

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Perkebunan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional, meliputi ; Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kesempatan kerja, Sumber Pendapatan dan Perekonomian regional dan nasional. Perkebunan menjadi penarik bagi pertumbuhan industry hulu dan pendorong pertumbuhan industry hilir yang memberikan kontribusi cukup besar kepada pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan kedepan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumber daya, terjadinya perubahan iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh.

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah terkait dengan bidang pembangunan perkebunan. Upaya pencapaian keberhasilan Visi dan Misi OPD perlu didukung dengan perencanaan yang baik, Pendekatan yang dilakukan adalah melalui Perencanaan Strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Tahun 2021 ini setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih pada tanggal 07 Juli 2021 oleh Bapak Presiden RI, maka dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 harus disusun, dan saat ini masih dalam proses pematapan terhadap Rancangan awal RPJMD untuk ditetapkan bersama DPRD menjadi RPJMD. RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sedang menyusun Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Ranwal RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026. Selanjutnya Ranwal Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi ini akan dibahas bersama untuk ditetapkan menjadi Renstra Dinas Perkebunan. Renstra yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi setiap tahunnya selama periode 5 (lima) tahunan kedepan.

Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul (Inpres. RI. Nomor 7 Tahun 1999).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat juga dilakukan evaluasi yang terkait dengan 3 (tiga) hal pokok, yaitu ; kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi merupakan suatu proses yang terletak pada bagian pertengahan, dan atau pada akhir dari proses kebijakan, yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Penilaian disini merupakan kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan untuk melakukan revisi terhadap substansi Renstra yang sudah ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja Perangkat Daerah kedepannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI. Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
17. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;

22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17, 18, 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
24. *Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor* Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor ...);
25. *Peraturan Gubernur Jambi Nomor* Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026, yaitu :

- a) Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pada subsektor perkebunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru program dan target kegiatan;
- b) Merupakan dokumen perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
- c) Mempermudah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026, yaitu:

- a) Menentukan arah dan menjadi acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan perkebunan di Provinsi Jambi untuk 5 tahun kedepannya.
- b) Mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2026 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diulas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dijelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan tentang indikator kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 43 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standarisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sertifikasi dan Mutu benih, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan, serta pengembangan pembibitan tanaman perkebunan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan supervisi di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- 5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD yang terkait;
- 7) Penyampaian laporan sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui sekretaris daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 bagian Sekretariat dan 4 bidang teknis serta 3 UPTD, sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17, 18, dan 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

2.1.1. Sekretariat

Tugas pokoknya adalah ; membantu dinas dalam rangka pengoordinasian, penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, dan administrasi umum serta kepegawaian lingkup dinas dan sekretariat.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan perencanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- b. Pelaksanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- c. Pengawasan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi dan keuangan dan aset.
- e. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan anggaran pembangunan.
- f. Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang lain dan UPTD.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat dibantu oleh ;

1. Sub.Bag Umum dan Kepegawaian

2. Sub.bagian Program dan Evaluasi

3. Sub.bagian Keuangan dan Aset

2.1.2. Sekretariat

Tugas bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan produksi tanaman perkebunan.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan kebijakan, strategi Pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- b. Pelaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan di bidang produksi benih, tanaman semusim, rempah penyegar, penyegar dan tanaman tahunan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- d. Pengelolaan kebun sumber daya genetik (SDG) Tanaman Perkebunan.
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- f. Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD dan,
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Perbenihan
2. Seksi Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
3. Seksi Tanaman Tahunan.

2.1.3. Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan

Tugas bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.

Sedangkan fungsinya sebagai:

- a. Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya Perkebunan.
- b. Pelaksanakan kebijakan, pembinaan, pengawasan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- c. Pelaksanakan kebijakan, pembinaan, pengawasan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- e. Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pelaku usaha perkebunan.
- f. Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesian sustainable palm oil (ISPO).
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- h. Penyusunan pertimbangan teknis bahan rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan untuk izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) dan izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P).
- i. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD.
- k. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan penyuluhan perkebunan sebagai pertanggungjawaban dan,
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengembangan perkebunan, terdiri dari :

1. Seksi Penataan Sumberdaya Perkebunan.
2. Seksi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi
3. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.

2.1.4 Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan

Tugas bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, prasarana dan sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisasi pengganggu tanaman, pengelolaan lahan dan air.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pengelolaan lahan dan air.
- b. Pelaksanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan Pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pengelolaan lahan dan air.
- c. Pelaksanakan evaluasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) Perkebunan, pengelolaan lahan dan air.
- d. Pelaksanaan pengawasan regulasi bidang perkebunan oleh (penyidik pegawai negeri sipil PPNS).
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana sarana dan perlindungan perkebunan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang lain serta UPTD.
- h. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- i. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana sarana dan perlindungan perkebunan sebagai pertanggungjawaban.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan lahan dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari :

1. Seksi Pupuk, Pestisida dan Prasarana Sarana Perkebunan
2. Seksi Penanganan Gangguan usaha dan OPT Perkebunan
3. Seksi Pengelolaan lahan dan air.

2.1.5 Bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Tugas bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu serta pemasaran hasil Perkebunan. Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- b. Pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil Perkebunan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan unit pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- f. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan harmonisasi penerapan standar mutu hasil perkebunan.
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- h. Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
2. Seksi Standardisasi dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan
3. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No.17 Tahun 2018, No.18 Tahun 2018 dan No.19 Tahun 2018, Dinas Perkebunan memiliki tiga (3) UPTD yaitu :

1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perkebunan dalam bidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian mutu benih dan mengawasi peredarannya, memberikan bimbingan pengawasan dan pengembangan mutu benih.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. pelaksanaan pengawasan peredaran dan mutu sumber benih.
- b. pelaksanaan pendataan potensi dan penyaluran benih.
- c. pelaksanaan pemeriksaan bahan penilaian izin usaha produksi benih.
- d. pelaksanaan evaluasi usaha produksi benih;.
- e. pelaksanaan pemeriksaan dokumen benih dan mengklarifikasi dengan sumber benih;
- f. pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu benih;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. pengoordinir tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP)

Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perkebunan dibidang pengujian dan pengembangan teknis perlindungan perkebunan.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. perencanaan program kerja dan anggaran UPTD BPTP;.
- b. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian internal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan perkebunan;
- d. pengkajian bahan petunjuk teknis operasional perlindungan tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait lingkup dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (BPPBTP) Sei Tiga

Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (BPPBTP) dinas Perkebunan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018, yang berkedudukan di desa Sei Tiga Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

UPTD-BP2BTP mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dalam peningkatan dan ketersediaan benih unggul tanaman perkebunan pada dinas.

Sedangkan fungsinya adalah :

- a. perumusan program kerja UPTD BPPBTP;
- b. pelaksanaan pengendalian teknis operasional penyediaan benih, penyaluran dan pemasaran benih;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi teknis terkait bidang tugasnya;
- d. penyediaan benih tanaman perkebunan;
- e. pengkoordinasian penyaluran benih tanaman perkebunan dengan bidang terkait;
- f. pelaksanaan pemasaran benih tanaman perkebunan atas persetujuan kepala dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. Sampai tahun 2021 jumlah tenaga Fungsional Teknis dinas Perkebunan Provinsi Jambi tersedia 20 (dua puluh) orang PNS yang tersebar pada setiap bidang, yang meliputi ; 7 orang Fungsional Penyuluh Pertanian, 2 orang Analis Pasar, 3 orang Pengawas Benih Tanaman, dan 6 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan 2 orang Fungsional Perencana.

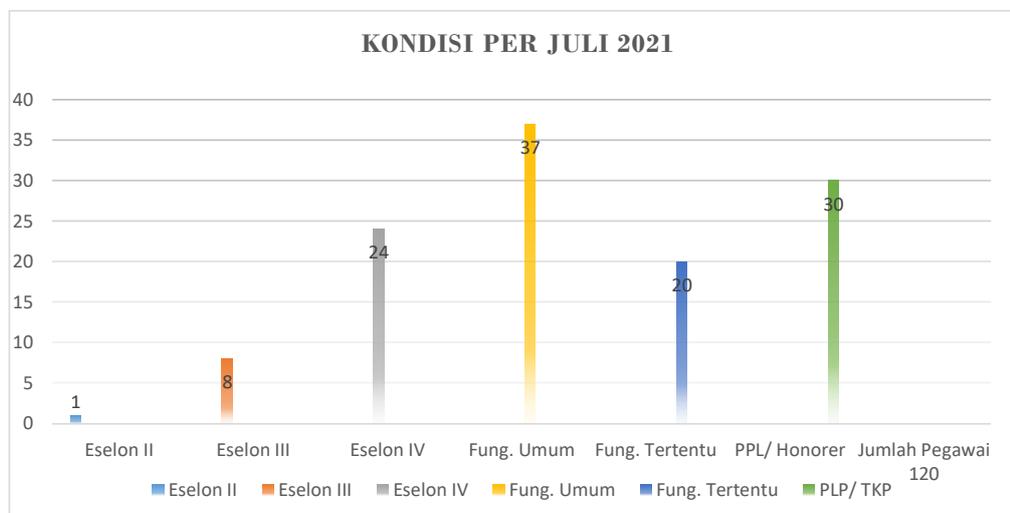
2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam pelaksanaan tugas kegiatan pembangunan, masing-masing Bidang, Sekretariat dan UPTD mengacu kepada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Secara umum, susunan Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

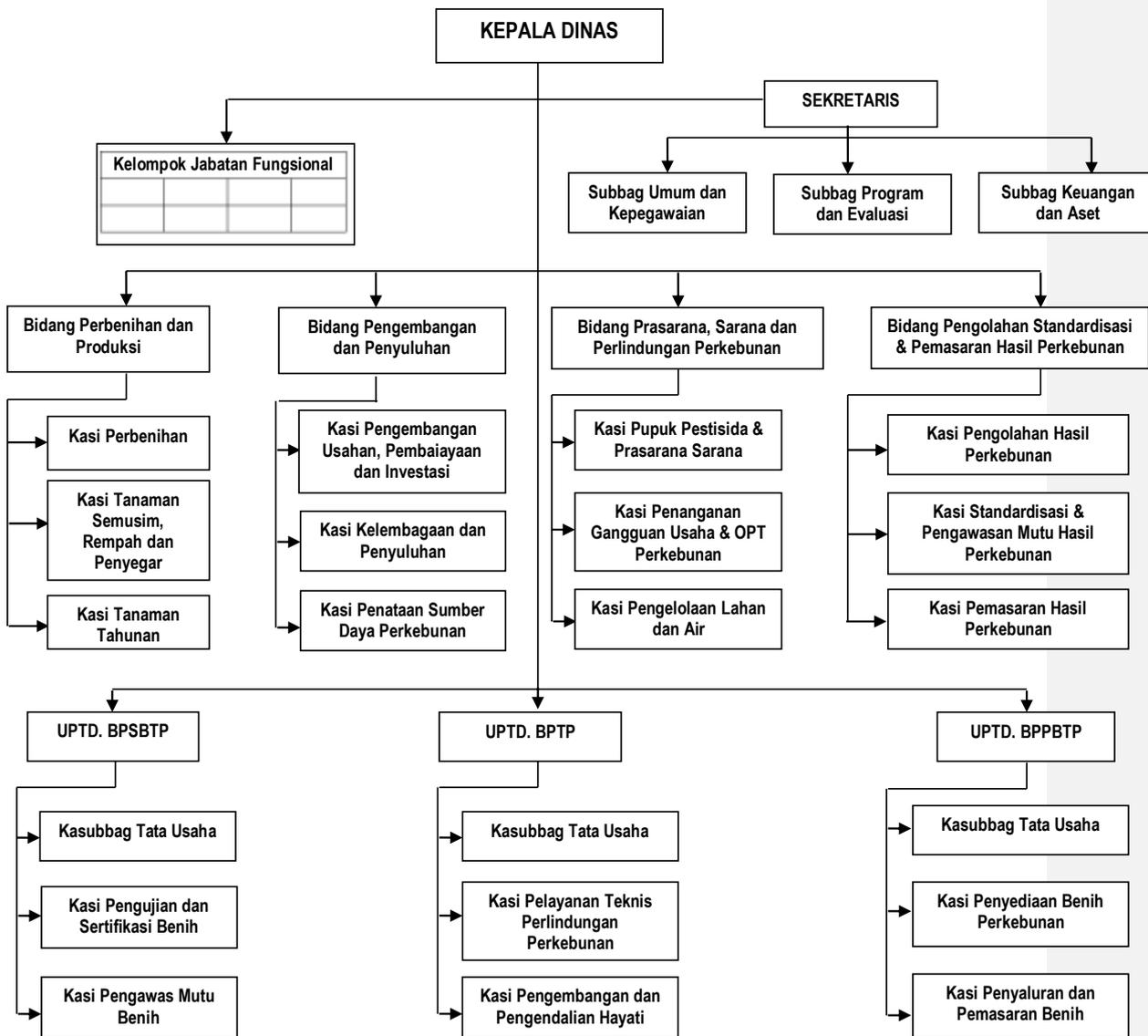
Tabel. 1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

No	Tingkat Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	7	Sekretaris, Kepala Bidang , dan Kepala UPTD
3	Eselon IV	17	Kasubbag dan Kasi
4	Fungsional	20	PP, AP, PBT, PMHP
5	Fungsional Umum	59	Sarjana dan non Sarjana
6	TKS dan PLTKP	43	Sarjana dan non Sarjana

Jumlah Pegawai yang tercatat mencapai 112 orang, dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dilengkapi dengan sarana kerja yang cukup lengkap akan tetapi saat ini kondisi sarana kerja tersebut sebagian besar dalam keadaan rusak ringan hingga berat. Untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin besar dimasa yang akan datang diperlukan penambahan sarana kerja yang lebih memadai. Selanjutnya susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI**



2.3 Telaahan Rancangan akhir Perubahan Renstra OPD periode 2016-2021

Perubahan atau Revisi Renstra dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dilakukan pada bulan Oktober 2018 sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, dan dengan tetap mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD.

Substansi Renstra dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang mengalami perubahan adalah terkait dengan, sebagai berikut ;

1. Penyesuaian Nomenklatur kegiatan, dan sub kegiatan yang terlalu panjang redaksinya, disederhanakan menjadi satu nama kegiatan/sub kegiatan.
2. Penyesuaian Capaian Indikator kinerja Sasaran (Outcome), penyempurnaan Target capaian setiap tahunnya.

Hasil telaah Rancangan akhir (Ranhir) Perubahan Renstra dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, diperoleh data dan informasi bahwa Ranhir Perubahan Renstra tersebut belum dilakukan secara Maksimal, terutama terhadap nilai angka capaian Target Sasaran, Program dan Kegiatan sesuai dengan Target yang ditetapkan didalam Renstra Kementan RI tahun 2019-2024.

2.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Renstra periode 2016-2021

Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan *pelayanan administrasi perkantoran*, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2020 mencapai rasio 1,17 atau 117 %, dari sisi kuantitas mencapai rasio 0,94.

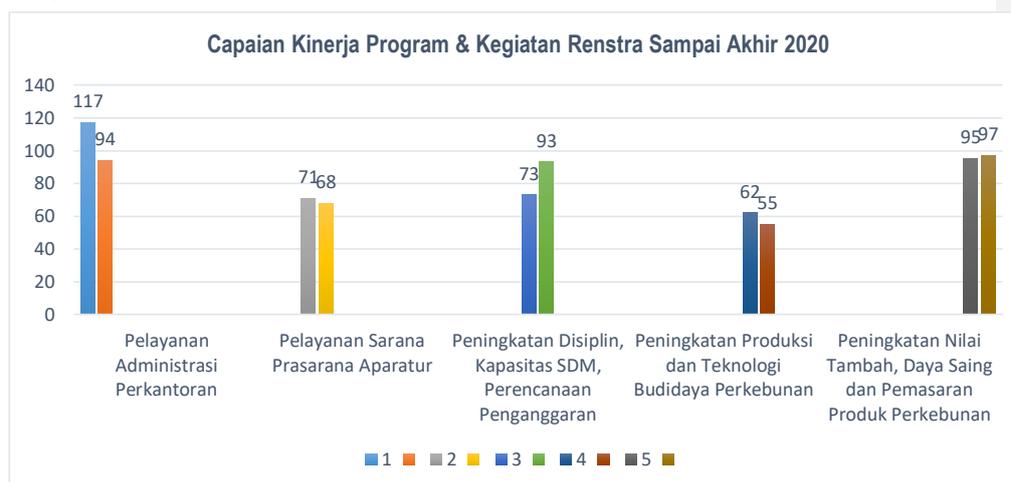
Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya *penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur*, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2020 mencapai rasio 0,68 atau 68 %, dari sisi kuantitas mencapai rasio 0,71.

Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya *peningkatan disiplin, kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan pelaporan*, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2020 mencapai rasio 0,73 atau 73 %, dari sisi kuantitas mencapai rasio 0,93.

Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya *peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan*, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2020 mencapai rasio 0,62 atau 62 %, dari sisi kuantitas mencapai rasio 0,55.

Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya *peningkatan Nilai tambah, Daya saing dan Pemasaran produk perkebunan*, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2020 mencapai rasio 0,95 atau 95 %, dari sisi kuantitas mencapai rasio 0,97.

Terkait dengan pelaksanaan Renstra dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2016-2021, berbagai program dan kegiatan telah digelontorkan baik melalui pembiayaan APBD-Provinsi Jambi maupun dukungan dana APBN setiap tahun sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dinas Perkebunan Provinsi Jambi.



Capaian kinerja dinas Perkebunan Provinsi Jambi selama 5 tahun, secara umum dapat dikategorikan **Cukup Baik**, hal ini diindikasikan dengan **rasio Serapan Anggaran sebesar 0,83** atau dapat dikatakan penggunaan Anggaran hanya 83 % dari Target anggaran Renstra yang ditetapkan, namun **capaian rata-rata rasio Kuantitas sebesar 0,82** artinya hanya 82 % saja

kegiatan yang ditetapkan didalam Renstra dapat dilaksanakan, dan atau sebesar 18 % kegiatan yang ditetapkan didalam Renstra tidak dapat direalisasikan.

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, baik internal maupun eksternal.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup kualitas sumberdaya manusia, kemampuan anggaran dan kebijakan Pemerintah. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah tuntutan masyarakat dan globalisasi pasar dunia yang berkembang. Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Dinas Perkebunan selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

2.5 Capaian penting Renstra periode 2016-2021

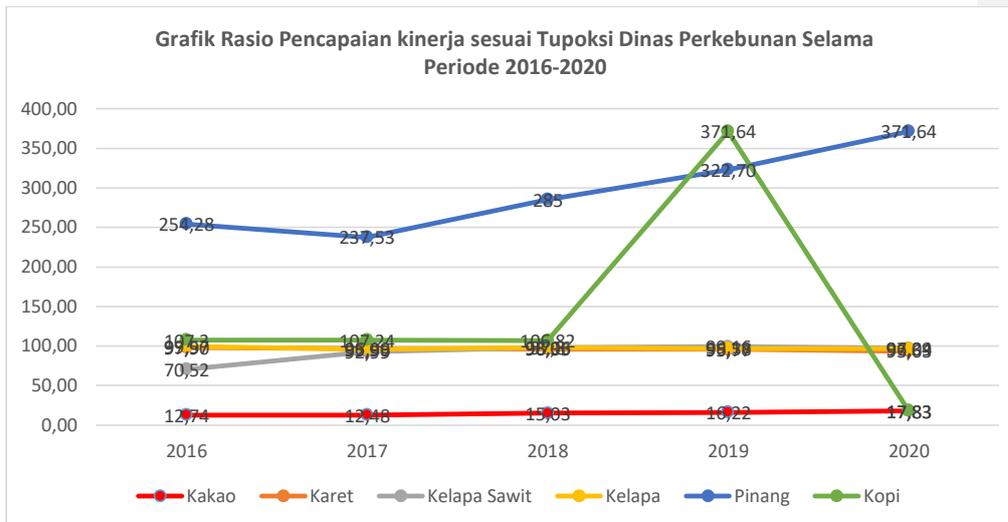
Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. (T-C 23), dimana terdapat perubahan target dan indikator kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi khususnya komoditi Perkebunan yang diselaraskan juga dengan Program Nasional. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dinas Perkebunan tahun 2020 yakni :

a. Komoditi Perkebunan

- Indikator kinerja komoditi perkebunan adalah produksi dimana untuk komoditi kelapa sawit, karet , kelapa, dan kakao rata-rata Capaian kinerja mencapai lebih kurang dari 91,50 – 97,12 persen, kecuali untuk komoditi Kakao hanya mencapai rata-rata 14,86 persen , sedangkan komoditi kopi dan pinang mencapai rata-rata 106,57- 304,22 persen melebihi target yang ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi pada komoditi perkebunan

antara lain, petani pekebun belum sepenuhnya menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) secara konsisten, petani pekebun masih ada menggunakan bibit palsu (bibit ilegal/tidak bersertifikat dan tidak bermutu), perubahan harga jual komoditi perkebunan yang mempengaruhi motivasi petani dalam melaksanakan intensitas perawatan kebun dan panen, bertambahnya luasan tanaman tidak menghasilkan/rusak dan tidak produktif, aspek kelembagaan petani dan penyuluh pertanian yang belum berfungsi dengan baik dan optimal dalam pemberdayaan petani serta perubahan iklim yang berpengaruh terhadap serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan kebakaran lahan perkebunan.

- Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi kelapa adalah tanaman tidak dipanen oleh petani disebabkan harga jual yang rendah. Petani merasa rugi karena ongkos panen lebih tinggi dari harga jual. Selain itu juga petani kelapa belum menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) karena keterbatasan modal dan SDM, tanaman kelapa banyak yang sudah tua dan rusak yang sangat berpengaruh pada jumlah produksi dan produktivitas.
- Sedangkan permasalahan pada tanaman karet adalah petani karet belum menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) karena keterbatasan modal dan SDM, tanaman sudah banyak yang tua dan rusak akibat kurangnya perawatan, terdapat harga jual hasil olahan karet yang rendah menyebabkan petani karet tidak melakukan intensitas perawatan dan panen serta petani karet melakukan alih komoditi lain.
- Permasalahan pada tanaman kakao dikarenakan belum adanya bibit yang bersertifikat / bibit unggul seperti tanaman kelapa sawit / karet yang mempunyai produktivitas tinggi sehingga petani menanam tanaman kakao dari hasil anakan tanaman kakao disekitar kebun, selain itu perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan perilaku Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman kakao. Kemudian, terdapat kondisi tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, kurangnya intensitas pemeliharaan kebun, serangan OPT dan belum diimplementasikannya Good Agricultural Practices (GAP) secara konsisten.



b. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan

Usaha untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditi tanaman perkebunan dilakukan melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, alat pasca panen maupun promosi yang dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang terdaftar di Provinsi Jambi masih berjalan secara maksimal. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor Perkebunan belum memenuhi target yang diinginkan. NTP Provinsi Jambi tahun 2017 terealisasi sebesar 115,30 naik sebesar +4,82 persen dari target 110,0; tahun 2018 terealisasi sebesar 102,47 atau menurun -14,61 persen dari target 120; tahun 2019 terealisasi 109,98 atau menurun sebesar -8,35 persen; tahun 2020 terealisasi 124,27 atau naik + 3,56 persen.

NTP Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2020 sebesar 124,27 % menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pekebun tercapai karena harga yang diterima petani pekebun lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh petani pekebun untuk biaya produksi usahatani. Kenaikan NTP ini didukung oleh peningkatan komoditi ekspor komoditi perkebunan yaitu kelapa sawit, kopi, kayu manis dan pinang. Sedangkan pada tahun 2017-2019 walaupun nilai NTP sub sektor perkebunan mengalami penurunan pada tahun 2019, namun nilai NTP masih diatas 100 yang berarti nilai harga yang diterima petani masih lebih tinggi dari biaya produksi yang dikeluarkan petani pekebun.

Untuk mempertahankan kondisi NTP sub sektor perkebunan ini perlu dan menetapkan program dan kegiatan komoditi perkebunan yang berorientasi ekspor yang dimulai dari program kegiatan di sektor hulu, kelembagaan dan sektor hilirisasi. Sehingga diharapkan visi misi Gubernur Jambi periode 2021-2024 dapat tercapai.

(Tabel 2. T - C.23) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Kondisi Kinerja pada	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						2016	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan produksi komoditi unggulan Perkebunan																			
	- Kelapa Sawit (ton)	-	-	-	1.669.652	1.669.652	1.721.344	1.774.431	1.829.260	1.885.785	1.177.560	1.552.543	1.683.532	1.813.870	1.830.035	70,52	92,99	97,80	99,16	97,04
	- Kelapa (ton)	-	-	-	108.934	108.934	110.230	111.542	112.869	114.212	108.471	104.528	108.087	107.724	108.789	99,57	95,96	98,06	96,58	96,39
	- Karet (ton)	-	-	-	338.772	338.772	347.986	357.451	367.174	377.161	331.663	337.544	344.413	351.651	353.145	97,90	96,99	96,35	95,77	93,63
	- Pinang (ton)	-	-	-	5.302	5.302	4.700	4.167	3.695	3.276	13.482	12.594	13.395	13.447	13.732	254,28	237,53	285	322,70	371,64
	- Kopi (ton)	-	-	-	13.583	13.583	14.456	15.256	16.056	16.856	14.064	14.566	15.393	16.815	16.379	107,30	107,24	106,82	110,22	102,01
	- Kakao (ton)	-	-	-	5.632	5.632	5.335	5.050	4.786	4.632	718	703	802	819	826	12,74	12,48	15,03	16,22	17,83
	- Kayu Manis (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.276	56.253	56.681	56.826	57.072	-	-	-	-	-
2	Persentase peningkatan Nilai Tukar Petani																			
	NTP Sub Sektor Perkebunan	-	-	-	110,0	110,0	110,0	120,0	120,0	120,0	111,78	115,30	102,47	109,98	124,27	-	-	4,25	18,37	

TABEL.3. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	11.110.628.783	11.858.140.950	13.672.767.214	16.516.413.862	13.828.681.017,37	10.504.767.339	11.130.328.756	12.334.796.705	14.585.537.926	13.360.796.373,89	94,55	93,86	90,21	88,31	96,62	8.19	-7,57
Belanja Langsung	26.836.923.086	22.154.344.844,50	21.599.083.697	26.987.077.960,82	13.734.453.025	22.642.362.140	20.970.473.068	16.315.788.449	24.404.023.236	13.392.454.974	84,37	94,66	75,54	90,43	97,51	13,90	-12,21
APBN Dekonsentrasi	3.649.888.000	662.510.000	2.137.800.000	1.196.650.000	1.340.600.000	2.983.169.895	572.929.718	2.018.275.658	1.140.612.973	1.318.452.580	81,73	86,48	94,41	95,32	98,34	11,88	-10,61
APBN TP	13.811.751.000	27.633.456.000	23.594.334.000	34.634.646.000	14.768.672.000	12.121.658.652	24.467.947.157	20.436.603.753	33.760.120.500	14.669.732.450	87,76	88,54	86,62	97,47	99,33	8,52	-7,85



Berdasarkan tabel.2. (Tabel.T.C 23) tentang Pencapaian kinerja dinas Perkebunan Provinsi Jambi dari tahun 2016 – 2020 bahwa ; Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Perkebunan berhasil dipertahankan diatas nilai 100 walaupun berfluktuasi. NTP Provinsi Jambi tahun 2017 terealisasi sebesar 115,30 atau naik +4,82 persen dari target 110,0; tahun 2018 terealisasi sebesar 102,47 atau menurun -14,61 persen dari target 120; tahun 2019 terealisasi 109,98 atau menurun -8,35 persen; tahun 2020 terealisasi 124,27 atau naik + 3,56 persen.

c. Realisasi dan serapan anggaran APBD dan APBN.

Berdasarkan data Tabel 3. (Tabel.T.C.24) diatas, dapat diketahui bahwa realisasi dan anggaran APBD dan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

- Pada belanja tidak langsung terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana adanya perubahan terhadap jumlah PNS (Pegawai pensiun dan Pegawai mutasi) dan perubahan terhadap besar tunjangan pegawai. Rasio antara realisasi dan pagu anggaran belanja tidak langsung cukup baik dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,19 persen, namun dari sisi realisasi serapan mengalami penurunan sebesar -7,57 persen, hal ini akibat dampak penganggaran pada tahun 2020 pada saat bencana nasional berupa wabah Pandemi Covid-19, telah dilakukan Rasionalisasi kembali melalui Refocusing APBD TA.2020.

- Sedangkan belanja langsung pada tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran (Rasionalisasi) yang cukup besar dari Rp. 27.722.045.428 menjadi Rp. 13.734.453.025,-. Sampai akhir tahun anggaran realisasi serapan dana sebesar 97,51 persen. Adapun capaian serapan anggaran antara realisasi dan pagu anggaran murni rata-rata pertumbuhannya 13,90 persen dan realisasi serapan mengalami penurunan sebesar – 12,21 persen. Namun jika dilihat dari pagu rasionalisasi, capaian kinerja adalah sebesar 82,19 % dan pelaksanaan fisik sesuai dengan progres yang telah ditetapkan.
- Rasio antara realisasi dan anggaran untuk Dana APBN Dekonsentrasi sangat tinggi mencapai 98,34, sisanya merupakan efisiensi atau sisa kontrak. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran APBN Dekonsentrasi sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -10,61 persen.
- Dana APBN Tugas Pembantuan, capaian terhadap Rasio antara realisasi dan pagu anggaran adalah cukup baik dimana pada tahun 2020 mencapai 99,33 persen sisa anggaran merupakan sisa kotrak, sedangkan rata-rata pertumbuhan anggarannya mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar - 7,85 persen.

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Kinerja pembangunan perkebunan secara nasional selama 3 tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Indikator ekonomi makro seperti Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Neraca Perdagangan, dan Penyerapan Tenaga Kerja Rakyat menunjukkan trend positif.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan yang digunakan sebagai pedoman di dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan potensi wilayah maka arahan pengembangan tanaman perkebunan untuk pembangunan tahun ke depan lebih difokuskan pada optimalisasi penggunaan benih dan bibit unggul berkualitas, intensifikasi dan diversifikasi, peremajaan

tanaman, penggunaan lahan melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) pekebun serta upaya mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi petani/pekebun yang terdampak Pandemi Covid-19 sejak dua tahun terakhir ini.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan masih diperlukan sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Dalam KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA);
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tanaman perkebunan terkait dengan 6 aspek tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunya nilai kompetitif
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan

dan pengaturan pola tanam.

5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung (alat/mechanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan
8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.
9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra K/L , Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS, tidak semuanya dapat dikerjakan dan hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan, terutama dalam hal pencapaian peningkatan luas tanam, luas panen, jumlah produksi dan produktifitas tanaman perkebunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan Dinas Perkebunan berbagai tantangan dan peluang sebagai berikut :

➤ **Tantangan**

- Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi teknis.
- SDM pelaku usaha perkebunan dan Kelembagaan masih rendah
- Akses petani terhadap permodalan dan Sarana prasarana produksi serta pemasaran masih terbatas.
- Isu lingkungan hidup (kesuburan tanah), globalisasi dan anomaly iklim serta penerapan teknologi masih terbatas.

➤ **Peluang**

- Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan
- Adanya Kebijakan Nasional tentang program Grasida, Grati eks, Food Estate, Mitigasi, dan antisipasi perubahan iklim.
- Adanya potensi Kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerah Jambi (Kelapa sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang, Kakao, Kayu Manis dan Tembakau) serta Lahan yang Potensial.
- Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industri pengolahan hasil perkebunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perkebunan maka indikator program yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya produksi tanaman unggulan (kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, pinang, kakao, dan kayu manis)
2. Meningkatnya produktivitas tanaman unggulan (kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, pinang, kakao, dan kayu manis)
3. Terciptanya pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan oleh pelaku utama maupun pelaku usaha perkebunan.
4. Meningkatnya posisi tawar petani melalui pengembangan kawasan tanaman perkebunan berbasis korporasi petani
5. Meningkatnya peran kelembagaan petani dalam mendukung penerapan Good Agriculture Practices (GAP) secara konsisten oleh petani perkebun
6. Terciptanya industri hilirisasi yang mengarah kepada konsep korporasi petani
7. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (aparatur, penyuluh dan petani perkebun)

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja program tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni :

1. Aspek Teknis

1.1 Luas tanaman tua dan rusak (TTM/TR) semakin bertambah

Potensi luas perkebunan di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 4. Dari luas perkebunan terdapat luas komoditas tanaman perkebunan tanaman tua dan rusak (TTM/TRR) dari total luas perkebunan di Provinsi Jambi sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Terdapat TTR yang berkurang pada tahun berikutnya adalah karena dua kemungkinan, pertama telah dilakukan peremajaan kembali, dan kedua atau telah dikonversi tanamannya berubah menjadi tanaman jenis lainnya.

Tabel.4. Luas Perkebunan 7 (tujuh) komoditi unggulan di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

No	Komoditi	Luas (Ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Karet	668.919	669.521	673.350	671.319	669.331
2	Kelapa Sawit	535.827	791.025	1.039.920	1.079.334	1.041.434
3	Kelapa Dalam	118.978	118.540	118.341	118.779	119.100
4	Kopi	26.286	28.441	29.780	27.274	29.438
5	Pinang	19.969	20.694	20.985	21.531	21.819
6	Kakao	2.270	2.354	2.438	2.574	2.681
7	Kayu Manis	46.289	46.132	45.924	45.805	45.699
Jumlah		1.418.538	1.676.707	1.930.738	1.966.616	1.929.502

Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2020;

Berdasarkan tabel 4 diatas, bahwa Luas lahan perkebunan setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan seluas 37.114 Ha atau sebesar 1,92 %, hal ini disebabkan adanya penurunan Luas lahan dari komoditi Karet sebesar 0,30 %, Kelapa Sawit menurun 3,6 %, dan komoditi Kayu Manis sebesar 0,23 %. Menurut data statistik Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2019 tercatat luas lahan perkebunan di Provinsi Jambi mencapai 1.936.645 ha, sedangkan Luas lahan 7 komoditi unggulan perkebunan Provinsi Jambi tercatat seluas 1.929.502 ha, sisanya seluas 7.143 ha merupakan komoditi perkebunan lainnya.

Tabel 5. Luas Tanaman Tidak Menghasilkan dan Rusak (TTM/TR) Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

No	Komoditi	Luas (Ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Karet	111.516	112.660	109.982	104.098	101.445
2	Kelapa Sawit	15.606	24.185	27.054	34.794	119.281
3	Kelapa	18.663	18.179	18.051	17.970	17.890
4	Kopi	2.803	3.004	2.988	2.860	2.742
5	Pinang	783	792	831	839	847
6	Kakao	236	231	259	266	308
7	Kulit Kayu Manis	658	657	742	764	734
Jumlah		150.265	159.708	159.907	161.591	234.247

Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2020;

Berdasarkan tabel 5 diatas bahwa Luas tanaman Tua dan Rusak (TTM/TR) komoditi perkebunan setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,39 %, kecuali pada tahun 2020 mengalami peningkatan luas tanaman Tua dan Rusak yang sangat tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi terutama komoditi Kelapa Sawit rakyat mengalami peningkatan TTM/TR mencapai 72.656 Ha atau sebesar 44,9 %. Peningkatan luas TTM/TR ini sejalan dengan bertambahnya usia tanaman dari kebun eks plasma perusahaan kelapa sawit, adanya konflik perusahaan yang menyebabkan terlantarnya, faktor iklim serta telah dilakukan Update data Statistik Perkebunan secara online pada tahun 2019.

Penambahan luasan tanaman tidak menghasilkan / tanaman rusak ini sangat mempengaruhi jumlah produksi dan produktifitas tanaman perkebunan yang diusahakan oleh petani pekebun. Hal ini dengan sendirinya mempengaruhi pendapatan yang diperoleh petani pekebun

Adanya dukungan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dilaksanakan sejak tahun 2017 sangat membantu petani pekebun untuk meremajakan kebun kelapa sawitnya yang sudah tidak produktif lagi. Sampai dengan saat ini program PSR di Provinsi Jambi sudah tercatat realisasinya seluas 15.713, 10 Ha dengan target seluas 81.033 Ha sehingga masih tersisa tanaman sawit tidak menghasilkan/rusak (TTM/TR) seluas 65.320 Ha.

1.2 Masih rendahnya capaian produksi dan produktivitas tanaman perkebunan rakyat

Produksi perkebunan di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel.6 dibawah ini, secara angka statistik mengalami peningkatan, namun bila dilihat dari sisi produktivitas masing-masing komoditi perkebunan tersebut masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan angka Potensi Baku Teknis Nasional, kecuali untuk komoditi Pinang dan Kayu Manis produktivitasnya tercapai optimal diatas Potensi Baku Teknis Nasional, sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Produksi 7 komoditi unggulan Perkebunan di Provinsi Jambi 2015-2019

No	Komoditi	Produksi (Ton)					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Karet	331.663	337.544	344.413	351.651	353.145	Slab
2	Kelapa Sawit	1.177.560	1.552.543	1.683.532	1.813.870	1.830.035	CPO
3	Kelapa	108.471	104.528	108.087	107.724	108.789	Kopra
4	Kopi	13.537	14.566	15.393	16.815	16.379	Biji Kering
5	Pinang	13.482	12.594	13.395	13.447	13.732	Biji kering
6	Kakao	718	703	802	819	826	Biji kering
7	Kulit Kayu Manis	56.276	56.253	56.681	56.826	57.072	Kulit/Stick
Jumlah		1.701.707	2.078731	2.222.303	2.361.152	2.379.978	

Sumber : Data Olahan, dan Data Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2015-2019;

Tabel 7. Produktivitas 7 komoditi Unggulan Perkebunan Provinsi Jambi

No	Komoditi	Satuan	Rata-rata Produktivitas Tahun 2015-2019 (Kg/Ha/Tahun)	Potensi Teknis Produktivitas (Kg/Ha/Tahun)	Keterangan
1.	Karet : - Karet rakyat	Slab	930,4	1.760	Rendah
2.	Kelapa : - Kelapa rakyat	Kopra	1.216,4	1.500	Rendah
3.	Kelapa sawit : - Sawit rakyat	CPO	2.554,5	8.000	Rendah
4.	Kopi rakyat : - Kopi Robusta - Kopi Arabika - Kopi Liberika	Biji kering	918 602 565	1.300 1.000	Rendah
5.	Pinang	Biji kering	889	400	Optimal
6.	Kakao	Biji Kering	587,6	1.000	Rendah
7.	Kayu Manis	Kulit Kering	2.173,4	2.000	Optimal

Sumber : Data olahan, dan Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2020;

Rendahnya produktivitas akan berpengaruh kepada perolehan pendapatan petani pekebun. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, yaitu sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penggunaan benih unggul yang bermutu/bersertifikat;
- b. Belum terlaksananya penggunaan sarana produksi yang tepat teknis akibat keterbatasan modal dan SDM;
- c. Belum terlaksananya Good Agriculture Practices (GAP) secara konsisten;
- d. Pengendalian OPT belum dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan;
- e. Adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- f. Lambatnya kegiatan Replanting terhadap luasan tanaman tidak menghasilkan dan tanaman rusak (TTM/TR).
- g. Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah;
- h. Terbatasnya SDM petani, aparat dan petugas lapangan;
- i. Perubahan iklim.

1.3 Kondisi Sarana dan Parasarana belum memadai

Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa alat mesin pertanian maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Pada beberapa daerah hilir mengalami kerusakan tanggul, saluran dan pintu klep (trio tata air), sehingga menyebabkan intrusi air laut. Masuknya air laut menyebabkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah rusak, dan menyebabkan pertanian dan perkebunan rusak, tidak dapat tumbuh dengan baik. Beberapa daerah pesisir selain mengalami intrusi air laut juga abrasi, yaitu kehilangan wilayah daratan akibat tergerus ombak air laut. Kondisi jalan produksi di perkebunan dengan tanah mineral juga belum memadai sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

1.4 Penerapan teknologi pertanian masih rendah

Penerapan teknologi baik teknologi budidaya maupun panen dan pasca panen juga masih rendah, secara keseluruhan baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan. Penggunaan benih bermutu, teknologi pola dan jarak tanam, pengendalian Hama penyakit serta pemupukan juga masih tergolong rendah.

1.5 Ketersediaan dan pemanfaatan lahan

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan distribusinya yang tidak merata mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui. Kondisi demikian menimbulkan terjadinya Kompetisi pemanfaatan yang kurang sehat bagi kepentingan multi sektoral yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kasus gangguan usaha perkebunan.

Status perizinan perkebunan di Provinsi Jambi mendapat pengawalan dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu termasuk dalam provinsi yang menjadi pilot project Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Telah dilakukan monitoring evaluasi perizinan perkebunan secara intensif tiap tiga bulan, dan status perizinan Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sampai dengan bulan Oktober 2019 disajikan pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Status Data Perizinan Perkebunan Sawit di Provinsi Jambi dalam Stranas KPK tahun 2019

No.	Kabupaten/ Kota	Data diterima Provinsi						Ket
		Data SK		Lampiran Peta SK		HGU/HGB		
		ILOK	IUP	ILOK	IUP	JML	LUAS(HA)	
1	Lintas Kabupaten	40	18	40	18	44	66.093,45	*)
2	Batanghari	54	27	54	27	22	45.967,17	
3	Tanjung Jabung Barat	44	27	44	27	17	29.437,68	
4	Tanjung Jabung Timur	28	9	28	9	4	4.707,21	
5	Muaro Jambi	55	44	55	44	41	50.374,30	
6	Tebo	25	18	25	18	4	12.248,71	
7	Bungo	24	16	24	16	11	17.613,57	
8	Sarolangun	42	33	42	33	4	27.370,80	
9	Merangin	18	12	18	12	2	34,0	
10	Kerinci	1	0	1	0	1	3.014,60	
11	Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL	335	211	335	211	159	256.871,48	

Sumber : Data Perusahaan Perkebunan Sawit di Provinsi Jambi, Tahun 2019;

Keterangan *) Data SK telah ada, namun belum lengkap; Data Peta telah ada, namun belum Lengkap, dan data peta belum seluruhnya dibuat dalam bentuk file shp.

Semua data perizinan perkebunan seyogyanya harus lengkap terdapat Surat Keputusan pemberi izin baik dari Ditjen Perkebunan, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dengan didukung Izin Lokasi pada awalnya, kesemuanya harus dilengkapi dengan lampiran SKnya dan peta dalam bentuk shapefile.

Berdasarkan tabel 8 diatas bahwa masih banyak Perusahaan Perkebunan Sawit yang belum maksimal melaksanakan ketentuan dan kewajibannya sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pembangunan Perkebunan. Sebanyak 186 Perusahaan Perkebunan Sawit di Provinsi Jambi dengan total izin lokasi tercatat 335 persil, dan 211 persil izin usaha perkebunan (IUP) yang telah terbit, dan sebanyak 159 HGU/HGB yang sudah terbit.

Mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 833/Kpts/dr.020/12/2019 tentang Penetapan Luas tutupan Sawit Indonesia tahun 2019, bahwa Provinsi Jambi menempati peringkat ke-7 dengan luas lahan sebesar 1.134.640 Ha, dengan rincian 23.057 Ha perkebunan BUMN, 518.869 Ha Perkebunan Swasta, dan 592.714 Ha Perkebunan rakyat. Kebun inti Perusahaan Sawit yang sudah tertanam seluas 378.921,98 Ha, yang sudah di HGU-kan seluas 275.705,79 Ha, masih terdapat selisih kebun yang belum di HGU-kan seluas 103.216,19 Ha.

Luas Lahan kebun yang belum dapat diurus HGU tersebut tentu menjadi Potensi untuk terjadi konflik kepemilikan lahan. Konflik perkebunan ini dapat berakibat pada menurunnya produksi perkebunan. Untuk itu kedepannya maka perlu dilakukan upaya Pembinaan dan Pengawasan yang terpadu dan berkelanjutan sebagai upaya penanggulangan gangguan usaha perkebunan serta tetap berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

1.6 Industri hilir sub sektor perkebunan dan pemasarannya masih terbatas

Selain produk Kelapa sawit dan Karet yang telah diusahakan oleh industri perkebunan besar, kondisi industri hilir dari komoditas Kelapa, kakao, kopi, dan pinang serta Kulit Kayu Manis masih sangat terbatas, baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Sebagian besar ekspor yang dilakukan baru berupa bahan mentah. Untuk itu pengolahan komoditas perkebunan menjadi penting agar memberikan nilai tambah pada suatu produk, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas.

Peluang pengembangan industri hilirisasi terutama untuk komoditi kelapa sawit berupa Pabrik Kelapa Sawit Mini (PKS Mini), Pabrik Industri Vegetable Oil (IVO) yang dapat menghasilkan minyak nabati / biofuel pengganti minyak non

nabati, pabrik pengolahan kopi siap konsumsi, pabrik pengolahan pinang. Peluang tersebut didukung dengan bahan baku di sektor hulu yang cukup tersedia untuk pembangunan pabrik dan dikelola sendiri oleh petani pekebun dengan konsep korporasi petani.

Industri Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) saat ini berjumlah 80 unit 70 Perusahaan, pabrik pengolahan karet berjumlah 9 unit dan pabrik pengolahan kelapa 18 unit. Potensi pengolahan produk dari pohon kelapa yang bisa dilaksanakan oleh petani skala rumah tangga dengan membentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu dari air kelapa (28%) adalah dibuat nata de coco, kecap, cuka dan minuman. Dari tempurung (16%) dibuat arang batok, tepung arang, arang aktif, dan barang kerajinan alat rumah tangga berupa gayung dan sendok sayur. Dari sabut kelapa (20%) dapat dibuat keset, karpet, tali dan matras, sedangkan dari lidi (5%) dibuat sapu lidi, aneka keranjang dan piring. Hal ini berlaku juga untuk produk turunan karet, kakao, kopi, pinang dan kulit kayu manis.

Jumlah PKS di Provinsi Jambi sampai dengan 2020 disajikan pada Tabel 9. tercatat 80 unit dengan total Kapasitas sebesar 3.447 dan Kapasitas terpasang sebesar 3.342 ton TBS/Jam, sedangkan Kapasitas terpakai sebesar 2.988,48 ton TBS/Jam. 80 unit PKS tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni PKS Kebun sebanyak 55 unit dengan Kapasitas 1.872 ton TBS/Jam, dan sebanyak 25 unit PKS Non Kebun dengan Kapasitas 1.575 ton TBS/Jam.

Tabel 9. Jumlah Pabrik Kelapa Sawit di Provinsi Jambi tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PKS Kebun		PKS Non Kebun		Total	
		Jumlah	Kapasitas (Ton TBS/jam)	Jumlah	Kapasitas (Ton TBS/jam)	Jumlah	Kapasitas (Ton TBS/jam)
1	Batanghari	10	367	1	60	11	427
2	Tanjung Jabung Barat	8	345	5	300	13	645
3	Tanjung Jabung Timur	0	0	3	105	3	105
4	Muaro Jambi	18	780	3	180	21	960
5	Tebo	7	125	3	90	10	215
6	Bungo	5	300	5	615	10	915
7	Sarolangun	2	120	3	135	5	255
8	Merangin	5	180	2	90	7	270
9	Kerinci	0	0	0	0	0	0
10	Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0
11	Kota Jambi	0	0	0	0	0	0
TOTAL		55	1.872	25	1.575	80	3.447

Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Jambi, Tahun 2020;

Tingkat pertambahan nilai dari komoditas perkebunan sebagai produk utama baik dari segi mutu maupun jenis yang masih rendah karena belum tersedia sarana dan prasarana pendukung. Oleh karenanya perlu dilakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengolah sumber daya di daerahnya masing-masing.

2. Aspek Non Teknis

2.1 Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu kaharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi.

Sampai saat ini SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja professional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penuh dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaann tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang. Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum megacu kepada aspek *“the right man in the right place”* terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

2.2. Kapabilitas petani masih rendah

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, oleh karena itu kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan capaian hasil pembangunan. Petani perkebunan secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian $\pm 80\%$ yang

berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan daripada petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.

2.3 Akses petani terhadap permodalan masih terbatas

Modal adalah unsur utama dalam pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan. Sampai saat ini petani masih kesulitan untuk bisa mengakses dan menggunakan pinjaman perbankan untuk biaya produksi usahatani. meskipun pemerintah melalui pihak perbankan sudah banyak mengeluarkan skema kredit. Kendala tersebut antara lain bunga pinjaman yang masih tinggi bagi petani pekebun terutama dengan grace periodelain itu juga disebabkan terbatasnya informasi, kemampuan manajerial dan pengetahuan petani, keengganan petani berurusan dengan pihak perbankan serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sehingga mereka tidak mampu memenuhinya.

2.4 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak

Pada saat ini masarakat, baik perseorangan atau korporasi masih rendah kesadaran untuk membayar pajak. Pajak masih dianggap sebagai beban. Padahal pajak merupakan kewajiban warganegara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik pembangunan daerah maupun Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut saat ini masih banyak areal perkebunan yang belum terbayar Pajak Bumi dan Bangunanya (PBB).

Berdasarkan data Statistik Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2020, Luas lahan perkebunan tercatat 1.936.645 Ha yang terdiri dari 519.224 Ha lahan kebun Perusahaan Sawit dan 1.410.431 Ha lahan kebun rakyat, 1.973 Ha lahan kebun Teh Perusahaan PTP.VI dan 500 Ha kopi PTP.VI, dan 4.517 Ha lahan kebun Karet Perusahaan. Bila disandingkan dengan data pada tabel 8 diatas, dimana penerbitan HGU/HGB Perusahaan Perkebunan Sawit di Provinsi Jambi baru tercatat 256.871,48 Ha yang sudah terbit HGU/HGB-nya sehingga masih ada peluang seluas 262.352,52 hektar yang belum membayar Pajak PBB P3 Perkebunan, artinya masih terdapat Potensi seluas 262.352,52 hektar yang

belum melakukan kewajiban membayar Pajak PBB P3 Perkebunan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya penertiban perizinan perkebunan, agar teridentifikasi wajib pajak perorangan dan korporasi yang akan membayar PBB, sesuai kewajibannya.

2.5 Budaya/kebiasaan masyarakat

Teknologi budidaya sebenarnya sudah berkembang pesat, namun penerapan di tingkat masyarakat/petani belum sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya adalah budaya atau kebiasaan masyarakat. Budaya/kebiasaan ini mulai dari pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan, panen pasca panen. Mengubah kebiasaan turun menurun ini dapat diubah melalui pendampingan petani secara kontinyu oleh petugas kabupaten maupun petugas penyuluh desa.

2.6 Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor perkebunan masih berfluktuasi

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi pada bulan Maret 2021, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi Maret 2021 sebesar 122,17 atau naik 3,20 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini dikarenakan Indeks Harga yang diterima petani (It) naik sebesar 3,7 persen namun Indeks Harga yang dibayar petani (Ib) naik hanya 0,16 persen. NTP Provinsi Jambi untuk masing-masing subsektor berfluktuasi tercatat 97,49 untuk subsektor Tanaman Pangan; 104,35 untuk subsektor Hortikultura; 128,48 untuk subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat.

Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Perkebunan masih berfluktuasi namun masih diatas nilai 100. NTP Provinsi Jambi tahun 2017 terealisasi sebesar 115,30 atau naik +4,82 persen dari target 110,0; tahun 2018 terealisasi sebesar 102,47 atau menurun -14,61 persen dari target 120; tahun 2019 terealisasi 109,98 atau menurun -8,35 persen; tahun 2020 terealisasi 124,27 atau naik + 3,56 persen. Dari realisasi NTP tahun 2017-2019 tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan petani sudah dapat tercapai walaupun masih berflutuasi.

2.7 Perubahan iklim global

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan (*El-Nino dan La-Nina*), sirkulasi angin, kenaikan muka air laut, rusaknya terumbu karang merupakan wujud dari pada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan yang harus diwaspadai.

Di Provinsi terdapat dua kali siklus kemarau, yaitu bulan Februari dan bulan Agustus, dan pada kondisi panas tersebut terdapat situasi yang rawan kebakaran pada lahan dan hutan. Di samping itu 60% areal Provinsi Jambi merupakan areal bergambut yang rawan terhadap kebakaran.

2.8 Laju Pertumbuhan penduduk relatif tinggi

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi termasuk pada kategori yang tinggi, dimana rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi selama 10 tahun (2010-2020) adalah sebesar 1,34 %. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Jambi tercatat 3.677.894 jiwa, bila dibandingkan pada tahun 2018 tercatat 3.570.272 jiwa, selama kurun waktu 3 tahun telah terjadi pertambahan penduduk sebesar 107.622 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini bukan saja disebabkan oleh angka kelahiran, tetapi lebih disebabkan karena migrasi penduduk dari luar Provinsi Jambi yang menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan konsumsi di Provinsi Jambi.

Tabel. 10.(T-B 3.6) : Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Produksi komoditas utama perkebunan belum optimal	- Rendahnya produktivitas komoditas utama perkebunan	- Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya tanaman yang baik dan benar (<i>Good Agriculture Practices/GAP</i>) secara konsisten - Infrastruktur yang belum memadai - Terjadinya anomali iklim (perubahan iklim global)
		- Tingginya perubahan komoditas non kelapa sawit menjadi kelapa sawit	- Menurunnya potensi lahan produktif - Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam (diversifikasi)
		- Kapasitas Kompetensi SDM yang masih rendah	- Kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur belum memadai - Kapasitas SDM petani masih rendah - Belum tercapainya program 1 Desa 1 orang Penyuluh - Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha yang belum menjangkau seluruh wilayah
2	Masih rendahnya mutu produk komoditas utama perkebunan	- Penanganan pasca panen yang belum optimal (<i>Good Handling Practices/GHP</i>)	- Masih kurangnya sarana pendukung pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen - Masih kurangnya SDM pasca panen dalam peningkatan mutu produk
3	Belum optimalnya kinerja perkebunan dalam menyumbang penerimaan daerah	- Belum optimalnya pendataan pelaku usaha perkebunan	- Masih banyaknya kepemilikan usaha perkebunan yang belum terdaftar dan/atau tanpa izin - Masih banyaknya pelaku usaha perkebunan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak - Masih minimnya informasi perpetaan kawasan perkebunan dari pelaku usaha perkebunan
		- Belum optimalnya keberterimaan produk perkebunan di luar negeri	- Masih kurangnya penerapan teknologi pengolahan yang baik dan benar (<i>Good Manufacturing Practices/GMP</i>) - Masih belum semuanya memiliki sertifikat berkelanjutan/ kelestarian (<i>sustainability</i>)

Comment [i-[1]: Revisi: Belum Optimalnya Pendampingan Petani

Tabel 11 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian					
1. Gambaran Pelayanan OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan data dan informasi perkebunan belum optimal - Pemberdayaan terhadap masyarakat/petani belum maksimal - Secara umum rasio pencapaian kinerja pelayanan sudah memenuhi setiap target yang diinginkan, bahkan terdapat beberapa yang melebihi. Namun terdapat beberapa sasaran yang tidak konsisten dilaksanakan setiap tahunnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fungisonalisasi Website. - Buku Statistik Perkebunan - SOP metode Pemberdayaan - Realisasi Renstra Dinas 2016-2020 terhadap target renstra (rasio capaian) 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM Aparatur - Akses terhadap data dan informasi - Prasarana dan sarana Teknologi Informasi Keterbatasan jumlah tenaga teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antar sektor/ stakeholders - Ketersediaan data dan informasi dari instansi terkait - Masih rendahnya minat investor untuk menanamkan investasi di Provinsi Jambi - Belum terjadinya akses jual/pemasaran dari produk olahan keluar dari Provinsi Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas aparatur terbatas - SDM aparatur bidang teknis tertentu masih kurang - Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir terbatas - Metode pemberdayaan belum diterapkan secara baik - Lemahnya koordinasi lintas sektor antara provinsi dengan Kab/Kota
2. Kajian terhadap Renstra SKPD	Luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman perkebunan	Angka Tetap (ATAP) dan Angka Sementara (ASEM) BPS	<ul style="list-style-type: none"> - SDM aparatur - Prasarana dan sarana - Tingkat penerapan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosial budaya masyarakat - Sumberdaya manusia petani - Kondisi geografi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM pertanian belum mantap - Rendahnya tingkat penerapan teknologi - Koordinasi antar pelaku usaha dan stakeholder masih rendah - Sebagian besar wilayah rawan bencana alam

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Produksi komoditas Kelapa sawit, Karet dan Kopi, Pinang dalam 5 (lima) tahun terakhir fluktuatif cenderung naik, sedangkan komoditas kelapa menurun.	Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Peranan UPT - Sinergitas Tupoksi - SDM aparatur - Prasarana dan sarana - Pemasyarakatan teknologi - Peranan UPT 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya Manusia Petani - Kondisi Geografi dan Demografi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan teknologi belum optimal - Tingginya pertumbuhan penduduk - Sebagian besar wilayah rawan Bencana Alam - Sosial budaya Masyarakat - Perubahan iklim (anomali) - Kemampuan aparatur dalam akses data dan informasi kurang - Kapasitas SDM belum memadai - Kemampuan aparatur dalam akses data dan informasi kurang
3. Kajian terhadap Renstra K/L	Dukungan terhadap upaya mencapai 6 (enam) sasaran Kementerian Pertanian di Provinsi belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi komoditi Perkebunan - Pengembangan komoditi perkebunan alternatif 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM Aparatur - Dukungan sarana dan prasarana yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi lahan tidak mendukung. - Alih Fungsi lahan - SDM Petani - Sinergitas antar sektor dan stake holder terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM pertanian belum mantap - Lambannya peningkatan produktivitas - Penerapan teknologi - Tingginya pertumbuhan penduduk - Sebagian besar wilayah rawan bencana alam - Tingginya alih fungsi lahan - Sosial budaya masyarakat - Anomali iklim - Kemampuan aparatur dalam akses data dan informasi kurang. - Satuan biaya untuk pengembangan produksi perkebunan tidak memadai

4. Kajian Terhadap RTRW	Berdasarkan RTRW Provinsi Jambi yang sudah disahkan, indikasi arahan peraturan pemanfaatan kawasan perkebunan seluas 1.936.645 ha, terdiri dari Perkebunan Besar seluas 526.214 ha dan Perkebunan Rakyat seluas 1.410.431 ha.	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perkebunan. - RTRW Provinsi Jambi 	Tidak tersedianya data yang akurat dan valid tentang lahan perkebunan existing dan cadangan lahan perkebunan Berkelanjutan	Pengesahan peruntukan Lahan oleh Kemterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	- Belum samanya persepsi tentang status penggunaan lahan antara Kementerian terkait dengan Pemprov Jambi.
5. Kajian Terhadap KLHS	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pembangunan saat ini harus mengacu kepada Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan dan terjaminnya kelestarian Lingkungan Hidup. - Dalam pelaksanaan usaha tanaman perkebunan saat ini masih banyak yang menggunakan pupuk anorganik. - Pembangunan sawit Berkelanjutan terus diupayakan melalui Sertifikasi ISPO bagi pelaku usaha perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMN - RPJMD - Renstra Kementerian - Sustainable Development Goals (SDGs) - Permentan.38 tahun 2020 tentang Sertifikasi ISPO 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM aparatur - Prasarana dan sarana terutama laboratorium - Pemasyarakatan pedoman dan standarisasi - Peranan UPT - Sinergitas tupoksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antar sektor/stakeholders - Ketersediaan data dan informasi dari Instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman aparatur dalam hal pembangunan berkelanjutan, keamanan pangan, dll - Masih terbatasnya upaya sosialisasi kepada masyarakat. - Belum mantapnya koordinasi lintas instansi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan sumberdaya alam yang tersedia dan sumberdaya manusia yang berkualitas didukung oleh sistem informasi yang handal. Upaya pemantapan nilai-nilai budaya kearifan lokal sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Jambi; penyelenggaraan pembangunan; pelestarian lingkungan; asimilasi kultural; menjaga dan memelihara heterogenitas.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, yaitu :

VISI : “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT “

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Jambi yang MAJU : Suatu Kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

- Jambi yang AMAN : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakkan Supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi yang NYAMAN : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek Sosial Budaya, Ekonomi, Lingkungan hidup dan Tata Ruang Wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antar Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi yang TERTIB : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi yang AMANAH : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang Religius dan menganyomi seluruh masyarakat yang flural.
- Jambi yang PROFESIONAL : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Transparan, dan Akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi;

2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.

Yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim , serta pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan;

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif;

Dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terlihat bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur telah menetapkan pembangunan perkebunan sebagai salah satu bidang yang menjadi perhatian sebagaimana tercantum pada misi ke-2, yaitu **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah “**, melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan.

Beberapa hal yang menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang kebijakannya akan dilaksanakan pada arah dan program dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sampai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah, yang terkait langsung dan tidak langsung dengan pembangunan perkebunan adalah :

1. Memantapkan Pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan, melalui Peremajaan Sawit rakyat, Karet rakyat, Kelapa Dalam rakyat ; Pengadaan alat mesin pertanian, pengembangan komoditas unggulan daerah, pemberdayaan

dan peningkatan kualitas produk; peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna serta Revitalisasi perkebunan.

2. Meningkatnya industri pengolahan, melalui fasilitasi penggunaan karet sebagai bahan baku aspal; fasilitasi percepatan pengembangan industri hilir CPO, karet dan kelapa dalam.

3.2.3 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah.

Permasalahan pelayanan perangkat daerah terkait pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2021-2024, meliputi internal dan eksternal yang dapat diuraikan pada tabel dibawah ini ;

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT

Tabel. 1 2 .Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Memantapkan Perekonomian masyarakat dan daerah (MISI.2)			
	Program 1.1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.2. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 1.3. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1.4. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1.5. Penyuluhan Pertanian 1.6. Perizinan Usaha Pertanian	1. Kapasitas aparatur dinas belum optimal. 2. Terbatasnya Infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan. 3. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal. 4. Belum optimal Cakupan wilayah pembinaan dan pengawasan serta Pengendalian. 5. Sinergisitas tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin dengan baik. 6. Masih rendahnya SDM pertanian ± 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah.	1. Belum tersedianya data akurat terkait Pemetaan Infrastruktur dan Sarana prasarana serta Tingkat Produksi dan Pengembangan Komoditi Perkebunan; 2. Masih terbatasnya pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan mutu benih, serta Peredaran benih dan pupuk di lokasi kebun masyarakat; 3. Belum optimalnya penanganan Pasca panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan; 4. Belum terjangkau pelayanan Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) Perkebunan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) serta Kebakaran lahan perkebunan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.	1. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan; 2. Adanya Kebijakan Nasional tentang program Grasida, Gratiexs, Food Estate, Mitigasi, dan antisipasi perubahan iklim; 3. Adanya potensi Kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerah Jambi (Kelapa sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang, Kakao, Kayu Manis dan Tembakau) serta Lahan yang Potensial; 4. Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industri pengolahan hasil perkebunan;

Dalam upaya pencapaian visi misi kepala daerah dalam hal ini gubernur, Dinas Perkebunan mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan perkebunan dalam pencapaian masyarakat Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional. Sinergi dengan visi misi tersebut Dinas Perkebunan bertanggungjawab terhadap pembangunan perkebunan.

Untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Untuk menciptakan tatakelola yang handal tersebut perlu melakukan terobosan melalui kinerja yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan perkebunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu perlu komitmen dan kompetensi SDM bidang perkebunan melalui peningkatan kualitas.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Pelaksanaan pembangunan pertanian periode tahun 2020-2024 merupakan tahap ke-5 dari pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025. Oleh karena itu diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan pembangunan periode sebelumnya dan menjawab isu-isu terkini, serta mengacu pada Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2015-2045. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2021- 2026 adalah :

1. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
2. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
3. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
4. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas di bidang pertanian (sub sektor Perkebunan) terdiri dari dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

- (1). Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional).

Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah :

- a. Meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif;
- b. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan
- c. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, pinang dan Kulit Kayu Manis.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan perkebunan yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil perkebunan. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi :

- a. Revitalisasi perkebunan rakyat.
- b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
- c. Pengembangan agroindustri perdesaan.
- d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran.
- e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar.
- f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

(2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda ke 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu *"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Moderen untuk terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian;

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian;
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Renstra Kementerian Pertanian RI akan dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2022-2026 yang akan datang. Mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian,

target kinerja dari Kementerian Pertanian selama 2020- 2024 adalah *Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.*

Selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan diarahkan untuk :

(i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM; (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat; (iii) meningkatkan kerjasama internasional; (iv) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, data dan informasi; (v) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Memperhatikan peran strategis dan multidimensi pertanian serta tantangan besar ke depan, maka paradigma “Pembangunan berbasis pertanian (*agricultural led development*) “ sudah tidak relevan lagi, perlu direorientasi dengan paradigma baru. Paradigma baru tersebut pertama adalah Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) bahwa rencana pembangunan perekonomian nasional disusun dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian secara rasional.

Sektor pertanian dijadikan sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh. Paradigma yang kedua adalah Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan sebagai transformasi dari orientasi pembangunan berbasis bahan baku fosil menjadi berbasis sumberdaya terbarukan (sumberdaya hayati). Paradigma ini menuntut peran pertanian tidak hanya penghasil utama bahan pangan, tetapi menjadi penghasil biomassa bahan baku biorefinery untuk menghasilkan bahan pangan, pakan, pupuk, serat, energy, produk farmasi, kimiawi dan bioproduk lainnya.

Berdasarkan kondisi yang ada selama ini dan menyadari akan tantangan dimasa depan, maka Visi Pembangunan Pertanian Indonesia 2015 – 2045 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika“

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dalam periode 2015 – 2045, maka pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan 10 sasaran, dimana 2 (dua) di antaranya yang sangat terkait dengan sektor perkebunan adalah :

1. Meningkatnya pendapatan dan taraf hidup penduduk perdesaan sehingga seluruh penduduk desa terbebas dari kemiskinan paling lambat pada tahun 2030.
2. Terwujudnya kemandirian pangan nasional paling lambat pada 2020, kedaulatan pangan nasional, tercapainya pola makan sehat dan beragam paling lambat pada tahun 2025 dan kedaulatan pangan komunitas paling lambat tahun 2045.

Pembangunan sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan dilaksanakan dengan **Paradigma Biokultura**, yaitu kesadaran, semangat, nilai budaya, dan tindakan memanfaatkan sumberdaya hayati bagi kesejahteraan manusia dalam ekosistem yang harmonis. Strategi utama yang dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan system Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan adalah :

1. Pengembangan sumberdaya insan yang kompeten dan berkarakter pertanian;
2. Optimalisasi sumberdaya alam;
3. Sistem inovasi ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi;
4. Infrastruktur pertanian, akses pembiayaan dan akses pasar;
5. Sistem usahatani agroindustri dan *agroservices* terpadu;
6. Klaster rantai nilai bioindustry;
7. Lingkungan pemberdaya bio-bisnis;

Salah satu kebijakan yang akan diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan strategi diatas adalah dengan menerapkan “Kebijakan ketahanan pangan, air dan energi”. Sejalan dengan itu, juga telah disusun Tahapan Periodik Pembangunan Pertanian, dimana priode 2015 – 2019 merupakan periode “Kokohnya fondasi sistem pertanian- bioindustri berkelanjutan” menuju tercapainya keunggulan daya saing pertanian terpadu berbasis sumberdaya alam berkelanjutan, sumberdaya insani berkualitas dan berkemampuan IPTEK bioindustri untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Disamping itu juga telah ditetapkan “Peta jalan (*roadmap*)” pengembangan sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan, di mana priode 2015 – 2019 merupakan tahap dimana indikator sosok usahatannya adalah usahatani dengan sistem pertanian terpadu, indikator sosok petaninya adalah petani pelaku aktivitas *on-farm* serta status ketahanan- kedaulatan pangannya adalah kemandirian pangan nasional menuju kedaulatan pangan nasional dengan sistem pertanian terpadu sudah terbangun.

SIPP ini akan dijadikan bahan rujukan dasar dan akan disejalankan dengan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam rangka ,menciptakan dan mewujudkan pembangunan perkebunan terpadu yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Selanjutnya sub sektor perkebunan memiliki kerangka strategis dalam pembangunan perkebunan nasional yaitu 1) Pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan meningkat, 2) Ekspor produk perkebunan meningkat, melalui program Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks) dan Gerakan peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah dan daya saing (Grasida).

Untuk mendukung kerangka strategis tersebut perlu dicapai peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan yaitu melalui program dan kegiatan sektor perkebunan secara nasional yaitu :

1. Benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan;
2. Efisiensi Budidaya tanaman perkebunan;
3. Perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal;
4. Peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan.

Output yang ingin dicapai pada Program benih tanaman perkebunan yang berkualitas dan berkelanjutan, yaitu antara lain :

1. Tersedianya Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
2. Tersedianya Nusery
3. Terlaksanya Pengujian Mutu Benih
4. Terlaksananya Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan

Output yang ingin dicapai pada Program Efisiensi budidaya tanaman perkebunan yaitu antara lain :

1. Terbentuknya Kawasan kopi, Kakao, Kelapa, Karet, Sagu, Jambu Mete, Lada, Pala, Cengkeh, Tebu.
2. Terlaksananya Bimbingan teknis dan Koordinasi.

Sedangkan Output yang ingin dicapai pada Program Perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal adalah sebaai berikut :

1. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
2. Desa Organik Perkebunan
3. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan dan DPI

Program Peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan memiliki target output yaitu :

1. Tersalurnya Sarana dan Prasarana Pascapanen dan pengolahan Hasil
2. Tersedianya Standarisasi Hasil Perkebunan
3. Terlaksananya Promosi Produk Perkebunan

Pencapaian kerangka strategis dalam pembangunan perkebunan nasional tersebut dilaksanakan di Kawasan Perkebun dalam rangka mendukung Major Project Korporasi Perkebun

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pembangunan perkebunan tidak bisa terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis suatu wilayah saat ini dan di masa mendatang. Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), salah satu isu utama pembangunan berkelanjutan tersebut adalah rendahnya ketahanan pangan dan keragaman genetik benih. Kerusakan ekosistem pada lahan perkebunan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain model pengelolaan lahan perkebunan yang tidak berkelanjutan yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan produksi. Hal ini berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan.

Dalam menyusun Rencana strategis (Renstra) tahun 2021–2026 harus mengacu kepada master plan Perkebunan Provinsi Jambi sebagai Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian sesuai dengan Permentan No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Penyusunan rencana pengembangan kawasan sentra produksi, merupakan upaya untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penetapan kawasan sentra produksi ini guna pengembangan komoditas utama/unggulan sektor perkebunan.

Komoditas unggulan tanaman perkebunan Provinsi Jambi ditentukan dengan mempertimbangkan faktor tingkat kesesuaian lahan, pemusatan komoditas, tingkat pertumbuhan luas tanam dan tingkat pertumbuhan produksi perkebunan. Dari kajian masterplan perkebunan, komoditas perkebunan yang layak ditetapkan sebagai komoditas unggulan adalah : kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, pinang, dan Kulit Kayu Manis. Daerah Provinsi Jambi juga merupakan salah satu Provinsi dengan areal perkebunan yang terluas di Indonesia, dimana saat ini terdapat sekitar 1,9 juta hektar lebih luas perkebunan di Provinsi Jambi dengan berbagai komoditas perkebunan. Luas areal perkebunan ini didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, karet, kulit kayu manis, kelapa, kopi, dan pinang.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan masih diperlukan sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Dalam KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA);
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tanaman perkebunan terkait dengan 6 aspek tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.

2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunnya nilai kompetitif
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam
5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung (alat/mekanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan
8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.
9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

Ancaman krisis pangan saat ini dan ke depan di Indonesia dan bahkan di seluruh belahan bumi akan semakin serius, baik sebagai akibat semakin berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global sangat dirasakan saat ini, dimana kekeringan dan banjir setiap Tahun melanda wilayah Jambi dan Indonesia secara keseluruhan. Sejak Tahun 2010 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celcius dan ada kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Bagi sektor pertanian dan perkebunan tentunya kondisi ini sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan produksi, bahkan dapat mengakibatkan gagal panen atau puso.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap Renstra K/L, RTRW dan KLHS ditentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Perkebunan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

❖ Kekuatan (*strenghts*) :

1. Tersedianya Sistem sarana dan prasarana (bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, PSPP, PSPHP, UPTD-BTP, UPTD-BPSBTP, UPTD-BPPBTP);
2. Tersedianya Sumber daya Manusia (Penyuluh, PPNS, PBT, Pengawas Pesticida, Petugas PUP, Brigade Karhutlah, tenaga teknis Pemetaan, tenaga Perencana, Fasda);
3. Tersedianya Laboratorium benih, OPT, dan APH, serta Lahan kebun dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
4. Tersedianya Regulasi tentang Perkebunan berupa Peraturan, Norma, Standar Operasional, dan Perda Provinsi Jambi No.19 tahun 2020 tentang Tata Niaga Perkebunan Provinsi Jambi;

❖ Kelemahan (*weakness*) :

1. Belum tersedianya data akurat terkait Pemetaan Infrastruktur dan Sarana prasarana serta Tingkat Produksi dan Pengembangan Komoditi Perkebunan;
2. Masih terbatasnya pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan mutu benih, serta Peredaran benih dan pupuk di lokasi kebun masyarakat;
3. Belum optimalnya penanganan Pasca panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan;
4. Belum terjangkaunya pelayanan Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) Perkebunan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) serta Kebakaran lahan perkebunan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

❖ Peluang (*opportunities*):

1. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan;
2. Adanya Kebijakan Nasional tentang program Grasida, Gratieks, Food Estate, Mitigasi, dan antisipasi perubahan iklim;
3. Adanya potensi Kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerah Jambi (Kelapa sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang, Kakao, Kayu Manis dan Tembakau) serta Lahan yang Potensial;
4. Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industri pengolahan hasil perkebunan;

❖ Tantangan (*threats*):

1. Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi teknis;
2. SDM pelaku usaha perkebunan dan Kelembagaan masih rendah;
3. Akses petani terhadap permodalan dan Sarana prasarana produksi serta pemasaran masih terbatas;
4. Isu lingkungan hidup (kesuburan tanah), globalisasi dan anomaly iklim serta penerapan teknologi masih terbatas.

Selain itu *untuk* mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, atau dikenal dengan REDD+, serta pertanian berkelanjutan dan tata ruang yang lebih baik, Dinas Perkebunan ikut berperan aktif dalam Program *BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL)*.

Program ini merupakan inisiatif pendanaan yang didukung negara-negara donor dan dikelola oleh World Bank. Program BioCF ISFL bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan lansekap secara berkelanjutan dan mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau yang dikenal dengan sektor

AFOLU (*agriculture, forestry and land use*), serta meningkatkan sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat sehingga mengurangi tekanan terhadap hutan alam dan lahan gambut.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan Provinsi Jambi yaitu : **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi akan mendukung terlaksananya ke tiga Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

➤ Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Jambi serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan daya saing subsektor perkebunan;
3. Meningkatkan kemampuan SDM – aparatur, petani dan kelembagaan.

➤ Sasaran

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta pendapatan petani;
3. Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis;

Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 13 (T.IV.C.25) berikut :

Tabel 13. (T.IV.C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026
 (IKU DINAS PERKEBUNAN)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP OPD	60,08 (B)	65,00 (B)	67,00 (B)	69,00 (B)	71,00 (BB)	73,00 (BB)
2.	Meningkatkan daya saing Subsektor Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Jumlah produksi Komoditas Unggulan Perkebunan						
			- Kelapa sawit (ton)	1.830.035	1.920.324	1.950.054	2.000.004	2.030.531	2.073.290
			- Kelapa (ton)	108.789	116.475	118.003	110.043	111.486	112.949
			- Karet (ton)	353.145	364.906	369.277	327.638	331.563	335.535
			- Kopi (ton)	16.379	16.511	17.573	25.346	26.976	28.710
			- Pinang (ton)	13.732	14.165	14.341	14.519	14.699	14.882
			- Coklat	826,00	867,30	908,60	949,9	991,20	1.032
			- Kulit Kayu Manis	57.072	53.422	53.679	53.937	54.196	54.452
			Produktivitas Tanaman Perkebunan						
			- Kelapa sawit (ton)	3,05	3,3	3,6	4,0	4,4	4,8
			- Kelapa (ton)	1,22	1,23	1,23	1,24	1,25	1,26
			- Karet (ton)	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,97
			- Kopi (ton)	0,85	1,23	1,32	1,42	1,53	1,65
			-Pinang (ton)	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94
			- Coklat (ton)	0,57	0,59	0,63	0,65	0,68	0,71
			-Kulit Kayu Manis (ton)	2,17	2,04	1,98	1,96	1,94	192
			Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	4,22	4,80	4,82	5,04	5,28	5,49
	Meningkatnya pendapatan petani	NTP Sub sektor Perkebunan	117,83	120,69	122,76	125,04	127,25	127,53	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

I. Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Terwujudnya peningkatan Nilai SAKIP OPD

- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD

II. Meningkatkan pendapatan petani tanaman perkebunan

Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan

- Jumlah produksi komoditas unggulan tanaman perkebunan.

Formulasi Perhitungan : jumlah produksi komoditas unggulan tanaman perkebunan tahun berkenaan.

Untuk menghitung pendapatan petani dilakukan dengan menghitung :

1. NTP sub sektor Perkebunan

Formulasi perhitungan : Data BPS

2. Tingkat pendapatan petani komoditas unggulan tanaman perkebunan (Rp/th)

Formulasi perhitungan : Rata-rata harga komoditi tanaman perkebunan tahun berkenaan dikali jumlah produksi dibagi 12 (dua belas) bulan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 , maka Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mendukung ke-3 Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT

MISI 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan : Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

MISI 2 : Memantapkan Perekonomian masyarakat dan daerah

Tujuan : Meningkatkan daya saing subsektor perkebunan

Sasaran : Meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dan meningkatnya pendapatan petani.

MISI 3 : Memantapkan Kualitas SDM

Tujuan : Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani dan kelembagaan.

Sasaran : Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan.

5.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam menentukan strategi dilakukan dengan evaluasi faktor-faktor lingkungan strategi yang mempengaruhi dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weakness*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*). Berdasarkan analisis SWOT dan pembobotan faktor-faktor internal dan eksternal maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD (bersih, transparan, dan akuntabel)

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

2. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun;

Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

3. Memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;

Pemenuhan penyediaan bahan baku bioenergi dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio- industri dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya.

4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan.

5.2 Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan perkebunan serta kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi, maka dirumuskan arah kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2021-2026 adalah :

1. Kebijakan Umum

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.
- b. Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan
- c. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
- d. Mewujudkan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- e. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan
- f. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan
- g. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan

- h. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan ditataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing
- i. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan
- j. Meningkatkan kompetensi kualitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan petani serta pelaku usaha dalam kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian serta memperkuat pemberdayaan kelembagaan baik ekonomi maupun sosial.

2. Kebijakan Teknis

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel dan profesional.
- b. Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk memfokuskan pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dalam perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap sumber penerimaan negara seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, pinang kakao, dan kulit kayu manis. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan tersebut dipilih pada lahan-lahan eksisting dan bukaan baru yang sesuai dengan potensi, kebutuhan dan kesiapan daerah. Fokus pengembangan komoditas unggulan perkebunan yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dipersyaratkan layak secara ekonomi, layak bio-fisik(agro-ecosystem), layak sosial, layak pasar dan layak pengembangan atau memiliki potensi keberlanjutan. Pengembangan komoditas tersebut diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas. Selain itu, arah kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendorong usaha agribisnis perkebunan dibudidayakan melalui sistem budidaya perkebunan yang baik dan berkelanjutan agar dihasilkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang optimal.

- c. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan teknologi melalui adopsi teknologi kepada petani dengan penyediaan alat dan mesin pertanian, melakukan surveylance dan pengujian hama dan penyakit tanaman perkebunan, pemantauan, pengawasan dan pengujian pupuk dan pestisida, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, pengembangan dan pengujian mutu benih, intensifikasi , pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, pengelolaan lahan dan air melalui normalisasi saluran drainase serta pembangunan dan rehabilitasi jalan produksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi teknologi pada tingkat petani agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih optimal, meningkatkan nilai tambah, atau lebih efisien dalam melakukan usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman.
- d. Meningkatkan nilai tambah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil tanaman perkebunan dengan memfasilitasi unit pengolahan produk, mendorong terwujudnya klaster industri hilir, meningkatkan intensitas promosi produk perkebunan, memperkuat jaringan pemasaran hasil olahan , meningkatkan mutu hasil produk melalui pembinaan pengolahan mutu produk petani dan pelaku usaha agribisnis serta meningkatkan akses kemitraan pemasaran dan pengembangan informasi pasar.
- e. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan penyuluhan yang maju dan berkelanjutan; mendorong dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha (stakeholder) serta lembaga swadaya masyarakat, guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Usaha yang akan ditempuh meliputi :
- Meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian petani serta petugas/aparatur melalui pelatihan.
 - Memperkuat pemberdayaan kelembagaan petani baik ekonomi (koperasi) maupun sosial (asosiasi)

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur sesuai yang tertuang dalam Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan perkebunan seperti Tabel.14 (T-C.26) berikut :

Tabel 14. (Tabel.T-C. 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT

Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD	1. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien
			2. Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan 3. Peningkatan pelayanan publik bidang Perkebunan secara akuntabel dan profesional
Misi 2: Memantapkan Perekonomian masyarakat dan daerah			
Meningkatkan daya saing subsektor Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun	1. Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan 2. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan. 3. Meningkatkan Nilai tambah yang berdaya saing dan Berkelanjutan dengan mengembangkan industri Hilir, pemasaran, dan Ekspor. 4. Meningkatkan akses Kemitraan pemasaran dan pengembangan informasi pasar. 5. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan Kawasan 6. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang lebih baik. 7. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan Lingkungan

Misi 2 : Memantapkan Perekonomian masyarakat dan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			8. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing
			9. Mewujudkan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan dan penanganan gangguan usaha perkebunan.
			10. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
			11. Mendorong sistem pertanian bio-industri berbasis pengembangan komoditas perkebunan.
			12. Mendorong peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan perkebunan serta Emisi Carbon.
	Meningkatnya Pendapatan petani	Peningkatan upaya pengembangan budidaya komoditas perkebunan.	1. Peningkatan luas tanam dan peremajaan tanaman perkebunan
			2. Peningkatan diversifikasi tanaman perkebunan/tanaman sela.
		Peningkatan produktivitas	1. Penyediaan Sarana pertanian
			2. Penyediaan Prasarana pertanian
		Peningkatan Kompetensi SDM	1. Penyediaan petugas lapangan yang Profesional.
			2. Peningkatan kualitas petani dan kelembagaan yang Mapan.
Misi 3 : Memantapkan Kualitas SDM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani. dan kelembagaan.	Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan.	Peningkatan kompetensi petugas / petani dan kelembagaan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian..	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia petani dan kualitas kelembagaan Sosial ekonomi petani serta pelaku usaha perkebunan.
			2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan penyuluhan dan Lembaga Swadaya masyarakat yang maju dan berkelanjutan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi maka tujuan utama program pembangunan tanaman perkebunan adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani tanaman perkebunan dan melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Perkebunan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perkebunan dan sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam pembangunan tanaman perkebunan di Provinsi Jambi serta memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Jambi, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan tanaman perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

a. Program Utama :

1. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian.

b. Program Pendukung :

Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka ditetapkan program pendukung sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN (URUSAN)

1. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian
 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ;
 - Pengawasan Sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian lainnya.
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian.

- Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman ;
 - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan.
 - Pengelolaan Sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme Kewenangan Provinsi ;
 - Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme.
2. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian
- Petanaan Prasarana pertanian/perkebunan ;
 - Perencanaan, pengembangan Prasarana, kawasan dan komoditi Perkebunan.
 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Pembukaan, pengelolaan dan rehabilitasi lahan perkebunan berbasis lingkungan).
 - Koordinasi dan Sikronisasi pelaksanaan pengelolaan Jalan Usaha Tani (JUT).
 - Koordinasi dan Sikronisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi (TAM) di tingkat Usaha tani.
 - Koordinasi dan Sikronisasi penataan Prasarana pendukung pertanian lainnya.
 - Pembangunan dan pemeliharaan Laboratorium pertanian.
 - Penyediaan peralatan Laboratorium pertanian.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi;
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan.
 - Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan.
 - Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun, Gangguan Usaha Tanaman (GUP) pangan, hortikultura, dan Perkebunan.
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
- Penerbitan Izin Usaha Pertanian (IUP) yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota;

- Penyusunan Standar Pelayanan Publik pemberian IUP.
- Penilaian Kelayakan dan Pemberian pertimbangan teknis IUP di Lintas Kabupaten/Kota.
- Pembinaan dan pengawasan Penerapan IUP.

5. Program Penyuluhan Pertanian

- Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian;
 - Kerjasama pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.
- Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian;
 - Diseminasi informasi teknis, social ekonomi dan inovasi pertanian.
 - Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian.
 - Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Perkebunan
 - Bimbingan teknis Pasca Panen.
 - Rintisan Sertifikasi ISPO Swadaya (BiO-CF).
- Pengembangan kapasitas Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan;
 - Pembentukan dan penguatan kelembagaan Korporasi petani.
 - Dukungan teknis penanganan Pasca Panen rakyat.
 - Bimbingan teknis Pasca panen Kopi dan Karet.
 - Rintisan Model Pengembangan desa Mandiri Benih.
 - Pertemuan kerjasama Perdagangan Petani dengan pengusaha (Pabrikan) (Program BiO-CF).
 - Identifikasi dan penguatan Hulu-Hilir Kelembagaan petani perkebunan.

6.2 PROGRAM DAN KEGIATAN (NON URUSAN)

Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka ditetapkan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikasi Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja dan Pendanaan Periode tahun 2021- 2026 ditampilkan pada Tabel 15 sebagai berikut :

Tabel.15

Indikator Kinerja Program Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)					Kondisi Akhir th 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai SAKIP	67,00 (B)	69,00 (B)	71,00 (BB)	73,00 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
2.	Meningkatkan daya saing subsektor Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	4,80	4,82	5,04	5,28	5,49	5,49
			Persentase Luas areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	10	10	10	10	10	10
3.	Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani. dan kelembagaan	Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan	Persentase kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0

Comment [i-[2]: Tabel Di sesuaikan Dengan RPJMD Ada Tabel Awal dan Tabel Akhir

Comment [i-[3]: Di Perbaiki

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja dengan Formulasi sebagai berikut :

I. NON URUSAN

- a. Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
 - Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
Formulasi perhitungan : jumlah pelayanan administrasi yang terlaksana dibagi dengan jumlah seluruh pelayanan administrasi di kali seratus
- b. Tercukupinya sarana dan prasarana kerja aparatur
 - Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Formulasi perhitungan : jumlah kegiatan sarana prasarana tahun berkenaan dibagi dengan jumlah kegiatan sarana dan prasarana kerja aparatur dikali seratus
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas dan disiplin aparatur
 - Persentase tingkat kehadiran ASN
Formulasi perhitungan : Jumlah kehadiran pegawai tahun berkenaan dibagi dengan jumlah seluruh pegawai di kali seratus.

II. URUSAN

1. Terwujudnya peningkatan produksi Perkebunan Produksi Komoditas Utama tanaman perkebunan
Formulasi perhitungan : Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan (data statistik tanaman perkebunan)

Produktivitas Komoditas Utama perkebunan,
Formulasi perhitungan : Jumlah produksi komoditas tanaman perkebunan tahun berkenaan (kg) dibagi dengan luas lahan produktif (TM) di kali seratus
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/perkebunan
Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya
Formulasi perhitungan : Jumlah SDM petani dan apartur yang ditingkatkan kompetensinya di bagi dengan jumlah petani / kelompok tani yang terdaftar dalam Simluhtan dikali seratus.

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan tanaman perkebunan di Provinsi Jambi adalah sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Jambi sangat mendukung terhadap pengembangan pembangunan tanaman Perkebunan. Akan tetapi potensi tersebut akan memberikan dampak yang optimal apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik. Untuk itu sangat diperlukan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku pembangunan tanaman perkebunan. Pendanaan untuk mencapai sasaran tersebut berasal dari APBD Provinsi Jambi, dengan alokasi dana indikatif untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung selama periode 2021 - 2026 disajikan pada Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagaimana disajikan pada Tabel 16. (Tabel T-C.27. Permendagri No. 86 Tahun 2017) sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	
3 27	NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	60,08 (B)	65,00 (B)	17.987.060.220	67,00 (B)	21.576.919.647	69,00 (B)	21.640.147.130	71,00 (BB)	22.780.803.861	73,00 (BB)	23.995.448.273	75,00 (BB)	25.441.725.210	75,00 (BB)	133.422.104.342	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	9 Dokumen	9 Dokumen	357.351.578	9 Dokumen	616.689.473	9 Dokumen	709.395.446	9 Dokumen	820.504.593	9 Dokumen	954.124.042	9 Dokumen	1.115.324.767	45 Dokumen	4.573.389.899	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKT, Statistik Perkebunan	6 Dokumen	6 Dokumen	179.486.000	6 Dokumen	224.357.500	6 Dokumen	280.446.875	6 Dokumen	350.558.594	6 Dokumen	438.198.242	6 Dokumen	547.747.803	36 Dokumen	2.020.795.014	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Buku RKA-Disbun	20 Buku	-	-	30 Buku	15.000.000	30 Buku	17.250.000	30 Buku	19.837.500	30 Buku	22.813.125	30 Buku	26.235.094	150 Buku	101.135.719	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Buku RKAP-Disbun	20 Buku	-	-	30 Buku	20.000.000	30 Buku	23.000.000	30 Buku	26.450.000	30 Buku	30.417.500	30 Buku	34.980.125	150 Buku	134.847.625	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Buku DPA-Disbun	20 Buku	-	-	30 Buku	15.000.000	30 Buku	17.250.000	30 Buku	19.837.500	30 Buku	22.813.125	30 Buku	26.235.094	150 Buku	101.135.719	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Buku DPAP-Disbun	20 Buku	-	-	30 Buku	15.000.000	30 Buku	17.250.000	30 Buku	19.837.500	30 Buku	22.813.125	30 Buku	26.235.094	150 Buku	101.135.719	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan (LPPK, LKj, LKPJ, LPPD)	5 Laporan	-	-	5 Laporan	150.000.000	5 Laporan	172.500.000	5 Laporan	198.375.000	5 Laporan	228.131.125	5 Laporan	262.350.938	25 Laporan	1.011.357.188	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan Evaluasi Renja, Renstra, SPIP, Monev Kegiatan.	3 Laporan	3 Dokumen	177.865.578	3 Dokumen	222.331.973	3 Dokumen	233.448.571	3 Dokumen	245.121.000	3 Dokumen	257.377.050	3 Dokumen	270.245.902	15 Dokumen	1.406.390.073	

3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Akuntansi dan Keuangan	5 Laporan	5 Laporan	15.721.978.899	5 Laporan	16.508.077.844	5 Laporan	17.333.481.736	5 Laporan	18.200.155.823	5 Laporan	19.110.163.614	5 Laporan	20.065.671.795		106.939.529.711	
			01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Periode Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	15.350.132.649	14 bulan	16.117.639.281	14 bulan	16.923.521.246	14 bulan	17.769.697.308	14 bulan	18.658.182.173	14 bulan	19.591.091.282		104.410.263.939	
			02	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi pengelolaan keuangan	48 Orang	50 orang	267.470.750	50 orang	280.844.288	50 orang	294.886.502	50 orang	309.630.827	50 orang	325.112.368	50 orang	341.367.987		1.819.312.721	
			04	Koordinasi danPelaksanaan AkuntansiSKPD	Jumlah dokumen pengajian laporan akuntansi dan keuangan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	104.375.500	3 Dokumen	109.594.275	3 Dokumen	115.073.989	3 Dokumen	120.827.688	3 Dokumen	126.869.073	3 Dokumen	133.212.526		709.953.051	
3	27	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Aset Barang Milik Daerah	3 Laporan	-	-	3 Laporan	183.800.000	3 Laporan	153.800.000	3 Laporan	153.800.000	3 Laporan	153.800.000	3 Laporan	303.800.000		949.000.000	
3	27	01	1.03	02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah kendaraan operasional Roda Empat yang diasuransikan	0	-	-	14 unit	93.800.000										
					Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah gedung kantor yang diasuransikan (Telanaipura)	0	-	-	4 unit	40.000.000	4 unit	10.000.000	20 unit							
				06	Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan aset barang milik daerah (BMD)	0	-	-	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	200.000.000	15 Dokumen							

3	27	01	1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Kepegawaian	3 Laporan	3 Laporan	103.969.200	3 Laporan	624.450.000	3 Laporan	655.672.500	3 Laporan	688.456.125	3 Laporan	722.878.931	3 Laporan	759.022.878		3.554.449.634
			02	Pengadaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	165 Stel	165 steel	76.969.200	165 steel	98.000.000	165 steel	102.900.000	165 steel	108.045.000	165 steel	113.447.250	165 steel	119.119.613	990 steel	618.481.063
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Tenaga Fungsional Tertentu	0	0	-	50 orang	3.600.000.000	250 orang	18.000.000.000								
			09	Pendidikan dan Pelatihan ASN	Jumlah ASN yang dilatih	20 Orang	20 Orang	27.000.000	120 Orang	526.450.000	120 Orang	552.772.500	120 Orang	580.411.125	120 Orang	609.431.681	120 Orang	639.903.265	620 orang	2.935.968.572
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor	5 Laporan	7 Laporan	660.047.073	7 Laporan	1.057.423.350	7 Laporan	1.100.994.518	7 Laporan	1.146.744.243	7 Laporan	1.194.781.456	7 Laporan	1.245.220.528		6.405.211.168
			01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik	6 Jenis	6 Jenis	17.430.000	6 Jenis	26.100.000	6 Jenis	27.405.000	6 Jenis	28.775.250	6 Jenis	30.214.013	6 Jenis	31.724.713		161.648.976
			02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis ATK	48 Jenis	48 Jenis	136.730.040	48 Jenis	219.253.750	48 Jenis	230.216.438	48 Jenis	241.727.259	48 Jenis	253.813.622	48 Jenis	266.504.303		1.348.245.413
			03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis ART	24 Jenis	24 Jenis	63.798.583	24 Jenis	83.033.200	24 Jenis	87.184.860	24 Jenis	91.544.103	24 Jenis	96.121.308	24 Jenis	100.927.374		522.609.428
			06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	3.900 eks	3.900 eks	10.958.450	3.900 eks	21.120.000	3.900 eks	22.176.000	3.900 eks	23.284.800	3.900 eks	24.449.040	3.900 eks	25.671.492		127.659.782
				Penyediaan Sewa Alat Kantor	Sewa Video Trone Regulasi Cukai Rokok (DBH CHT)		1 Unit	36.000.000	1 Unit	36.000.000	1 Unit	36.000.000	1 Unit	36.000.000	1 Unit	36.000.000	1 Unit	36.000.000		216.000.000
			09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi	925 OK	925 OK	245.130.000	950 OK	521.916.400	950 OK	548.012.220	950 OK	575.412.831	950 OK	604.183.473	950 OK	634.392.646		3.129.047.570
				Koordinasi operasi Rokok ilegal	Jumlah Pertemuan Tentang Rokok Ilegal (DBH CHT)	0	4 Kali	100.000.000	4 Kali	100.000.000	4 Kali	100.000.000	4 Kali	100.000.000	4 Kali	100.000.000	4 Kali	100.000.000		600.000.000
				Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal (DBH CHT)		0	3 Kab / Kota, 1 Provinsi	50.000.000	3 Kab / Kota, 1 Provinsi	50.000.000	3 Kab / Kota, 1 Provinsi	50.000.000	3 Kab / Kota, 1 Provinsi	50.000.000	3 Kab / Kota, 1 Provinsi	50.000.000	3 Kab / Kota, 1 Provinsi	50.000.000		300.000.000

3	27	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Jenis	2 Jenis	274.823.220	5 Jenis	1.412.637.581	3 Jenis	454.269.460	3 Jenis	476.982.933	3 Jenis	500.832.080	3 Jenis	525.873.684	3.645.418.957
			01	Pengadaan kendaraan dinas operasional /lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	3 Unit	0	-	25 Unit	980.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	980.000.000
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur	0	6 Jenis	172.007.220	6 Jenis	180.607.581	6 Jenis	189.637.960	6 Jenis	199.119.858	6 Jenis	209.075.851	6 Jenis	219.529.644	1.169.978.114
			06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Software dan Hardware	30 Unit	8 Unit	102.816.000	20 Unit	252.030.000	20 Unit	264.631.500	20 Unit	277.863.075	20 Unit	291.756.229	20 Unit	306.344.040	1.495.440.844
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat dan Jasa Komunikasi SDA, dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	372.990.000	4 Jenis	507.155.400	4 Jenis	532.513.170	4 Jenis	559.138.829	4 Jenis	587.095.770	4 Jenis	616.450.558	3.175.343.727
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	1155 surat	500 surat	39.348.000	500 surat	41.315.400	500 surat	43.381.170	500 surat	45.550.229	500 surat	47.827.740	500 surat	50.219.127	267.641.665
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagehan Rekening	3 Jenis	3 jenis	333.642.000	3 jenis	465.840.000	3 jenis	489.132.000	3 jenis	513.588.600	3 jenis	539.268.030	3 jenis	566.231.432	2.907.702.062
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	46 Unit	88 Unit	495.900.250	96 Unit	666.686.000	96 Unit	700.020.300	96 Unit	735.021.315	96 Unit	771.772.381	96 Unit	810.361.000	4.179.761.246

			01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	46 Unit	53 Unit	360.060.250	61 Unit	255.000.000	61 Unit	267.750.000	61 Unit	281.137.500	61 Unit	295.194.375	61 Unit	309.954.094	1.769.096.219	
			06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	27 Unit	27 unit	87.320.000	27 unit	91.686.000	27 unit	96.270.300	27 unit	101.083.815	27 unit	106.138.006	27 unit	111.444.906	593.943.027	
			09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung yang direhab	7 Unit	8 unit	48.520.000	8 unit	320.000.000	8 unit	336.000.000	8 unit	352.800.000	8 unit	370.440.000	8 unit	388.962.000	1.816.722.000	
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan Kabupaten/Kota.	75	80	5.182.420.790	80	18.002.948.246	85	20.978.510.517	85	21.223.335.201	90	22.895.762.587	90	23.262.821.184	111.545.798.525	
3	27	02	1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sebaran Peredaran Sarana Pertanian/Perkebunan	11 kab/kota	11 kab/kota	170.000.000	11 kab/kota	321.500.000	11 kab/kota	350.225.000	11 kab/kota	382.283.750	11 kab/kota	418.127.563	11 kab/kota	458.273.009	2.100.409.322	
			01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Sebaran Peredaran Pupuk, Pestisida, dan Sarana Pendukung Pertanian/Perkebunan	11 kab/kota	11 kab/kota	60.000.000	11 kab/kota	195.000.000	11 kab/kota	204.750.000	11 kab/kota	214.987.500	11 kab/kota	225.736.875	11 kab/kota	237.023.719	1.137.498.094	
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	Jumlah Pelaku Perbenihan Tanaman Perkebunan	40 Penangkar	40 Penangkar	110.000.000	40 Penangkar	126.500.000	40 Penangkar	145.475.000	40 Penangkar	167.296.250	40 Penangkar	192.390.688	40 Penangkar	221.249.291	40 Penangkar	962.911.228

3	27	02	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Komoditi Unggulan Lokal Perkebunan bersertifikat	4 Komoditi	3 Komoditi	4.876.220.790	6 Komoditi	16.651.348.171	6 Komoditi	19.157.671.085	8 Komoditi	18.900.860.970	8 Komoditi	20.031.893.798	10 Komoditi	19.752.851.736	99.370.846.549	
			01	Pengelolaan Sertifikat Benih	Ujimultilokasi Varietas Tan Tembakau (DBH CHT)	0	3 Kab/Kota	300.000.000	3 Kab/Kota	350.000.000	3 Kab/Kota	350.000.000	Penetapan Sertifikasi Benih	150.000.000						
			04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Komoditi Unggulan Lokal Perkebunan.	4 Komoditi	3 Komoditi	147.873.956	6 Komoditi	170.055.049	6 Komoditi	195.563.307	8 Komoditi	224.897.803	8 Komoditi	258.632.473	10 Komoditi	297.427.344	10 Komoditi	1.294.449.933
				Pengawasan Penyediaan Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Batang Pokok Terpilih dan Pohon Induk Terpilih	48 BPT/PIT	48 BPT/PIT	255.000.000	48 BPT/PIT	267.750.000	48 BPT/PIT	281.137.500	48 BPT/PIT	295.194.375	48 BPT/PIT	309.954.094	48 BPT/PIT	325.451.798	48 BPT/PIT	1.734.487.767
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Sertifikasi Benih/ Bibit Tanaman perkebunan	384 SMB	385 SMB	205.377.677	390 SMB	215.646.561	393 SMB	226.428.889	395 SMB	237.750.333	400 SMB	249.637.850	410 SMB	262.119.743	410 SMB	1.396.961.053
				Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah penangkar Legal	64 Penangkar	78 Penangkar	205.377.677	98 Penangkar	215.646.561	116 Penangkar	226.428.889	141 Penangkar	237.750.333	171 Penangkar	249.637.850	208 Penangkar	262.119.743	208 Penangkar	1.396.961.053
				Penyediaan Benih/Bibit tanaman Perkebunan	Tersedianya benih komoditi perkebunan															
					-Kelapa sawit	40.000 kecambah	40.000 kecambah	1.504.007.480	120.000 kecambah	3.180.000.000	150.000 kecambah	4.050.000.000	180.000 kecambah	4.950.000.000	200.000 kecambah	5.600.000.000	200.000 kecambah	5.600.000.000		24.884.007.480
					-Kopi robusta	0					15.000 entres	450.000.000	15.000 entres	472.500.000	15.000 entres	496.125.000	15.000 entres	520.931.250		1.939.556.250
					-Karet	0	3 ha	90.000.000	3 ha	94.500.000	24.000 benih	99.225.000	24.000 benih	104.186.250	24.000 benih	109.395.563	24.000 benih	114.865.341		612.172.153
					-Pinang Betara	0	3 ha	75.000.000	3 ha	78.750.000	3 ha	82.687.500	900.000 kecambah	86.821.875	1.200.000 kecambah	91.162.969	1.200.000 kecambah	95.721.117		510.143.461
					-Kultur jaringan tebu	0			75.000 benih	150.000.000	75.000 benih	157.500.000	75.000 benih	165.375.000	75.000 benih	173.643.750	75.000 benih	182.325.938		828.844.688

				Intensifikasi Kakao	Luas tanaman Kakao (TM)		0	-	10 Ha	150.000.000	10 Ha	157.500.000	10 Ha	165.375.000	10 Ha	173.643.750	10 Ha	182.325.938	50 Ha	828.844.688
				Diversifikasi Tanaman Perkebunan (Tumpang sari/Tanaman Sela)	Luas Lahan Diversifikasi / Tanaman Sela Perkebunan	0	0	-	50 Ha	900.000.000	50 Ha	945.000.000	50 Ha	992.250.000	50 Ha	1.041.862.500	50 Ha	1.093.955.625	250 Ha	4.973.068.125
				Bantuan Benih dan Sarana Produksi (DBH CHT)	Luas Lahan Pengembangan Tembakau	0	0	-	40 Ha	157.500.000	50 Ha	165.375.000	60 Ha	173.643.750	70 Ha	182.325.938	70 Ha	191.442.234	320 Ha	870.286.922
				Pengembangan Kopi dan Coklat di Areal Tanaman Perkebunan	Luas Lahan Pengembangan Kopi dan Coklat di Areal Tanaman Perkebunan	60 Ha	60 Ha	763.584.000	65 Ha	585.000.000	65 Ha	585.000.000	65 Ha	585.000.000	65 Ha	585.000.000	65 Ha	585.000.000	385 Ha	3.688.584.000
				Pengembangan Kayu Manis di Areal kebun rakyat Kab. Kerinci dan Kota Sei. Penuh.	Luas Lahan kebun Komoditi Kayu Manis				50 Ha	750.000.000	50 Ha	787.500.000	50 Ha	826.875.000	50 Ha	868.218.750	50 Ha	911.629.688	250 Ha	4.144.223.438
				Pengadaan dan Penanaman Bibit Tanaman Kayu Untuk Naungan (Bio - CF)	Jumlah Cakupan wilayah Penanaman Bibit Tanaman Kayu Untuk Naungan	0	0	-	4 PKH	2.250.000.000	4 PKH	2.250.000.000	4 PKH	945.000.000	4 PKH	945.000.000	0	-	-	6.390.000.000
				Fasilitasi Sertifikasi IG (Indikasi Geografis) Kopi	Jumlah Sertifikasi IG (Indikasi Geografis) Kopi	0	0	-	-	1 Dokumen	250.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Kab	-	250.000.000
3	27	02	1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG Tumbuhan, Mikro organisme yang dikelola		4 Kab/Kota	136.200.000	4 Kab/Kota	825.799.951	4 Kab/Kota	1.215.239.277	6 Kab/Kota	1.620.971.537	8 Kab/Kota	2.046.717.547	9 Kab/Kota	2.574.996.151		8.419.924.464
3	27	02	1.03	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro organisme	Tersedianya Kultivar SDG	0	9 Kab/kota	136.200.032	9 Kab/kota	156.630.037	9 Kab/kota	180.124.542	9 Kab/kota	207.143.224	9 Kab/kota	238.214.707	9 Kab/kota	273.946.913		1.192.259.455

3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Eksplorasi Mikro organisme pengendali hama dan penyakit tanaman.	0	0	-	4 Kab/Kota	204.300.124	5 Kab/Kota	255.375.155	6 Kab/kota	319.218.944	8 Kab/kota	399.023.680	9 Kab/kota	476.700.288	1.654.618.190		
					Perbanyak Agan Hayati Pengendali OPT Perkebunan dan Bahan	Jumlah Agan Hayati Pengendali OPT Perkebunan	0	0	-	20 Ton	300.000.000	40 Ton	450.000.000	60 Ton	600.000.000	80 Ton	750.000.000	100 Ton	1.000.000.000	3.100.000.000		
					Uji Efektivitas Agan Hayati skala Laboratorium pada tanaman Perkebunan	Luas Cakupan Efektivitas Agan Hayati skala Laboratorium pada tanaman Perkebunan	0	0	-	200 Ha	164.869.790	400 Ha	329.739.580	600 Ha	494.609.370	800 Ha	659.479.160	1000 Ha	824.348.950	2.473.046.850		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan di Kab/Kota		100		1.942.607.092	100	3.852.819.323	100	5.867.779.059	100	3.251.066.474	100	2.763.557.782	100	3.148.233.269	100	20.826.062.999
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang ditata	2 Kegiatan	4 Kegiatan		1.942.607.092	4 Kegiatan	3.852.819.323	4 Kegiatan	5.867.779.059	4 Kegiatan	3.251.066.474	4 Kegiatan	2.763.557.782	4 Kegiatan	3.148.233.269		20.826.062.999
				01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Prasarana Perkebunan Provinsi.	2 Dokumen	2 Dokumen		200.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	12 Dokumen	1.700.000.000						
					Penyusunan Rencana pengembangan prasarana perkebunan provinsi Jambi	Tersedianya Dokumen Perencanaan pengembangan prasarana perkebunan provinsi Jambi	0	0	-	1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	172.500.000			1 Dokumen	198.375.000	3 Dokumen	520.875.000	
				02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.	Tersedianya prasarana Perkebunan (Pengadaan Barang/Jasa) Keg.BioCF	0	0	-	5 Unit	415.000.000	5 Unit	415.000.000									830.000.000
				02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Terlaksananya Pembukaan, Pengelolaan dan Rehabilitasi Lahan Kebun Masyarakat Berbasis Lingkungan.	0	0	-	75 Ha	800.000.000	75 Ha	840.000.000	75 Ha	882.000.000	75 Ha	926.100.000	75 Ha	972.405.000	375 Ha	4.420.505.000	
						Tersedianya Alat Pembedas Cair (Pemanfaatan Limbah Kayu)	0	0	-	20 Unit	170.000.000	20 Unit	178.500.000	20 Unit	187.425.000	20 Unit	196.796.250	20 Unit	206.636.063	100 Unit	939.357.313	

			Bantuan Alat Pengolahan Pupuk Granular	Tersedianya Alat Pembuatan pupuk organik Granulat	0	0	-	1 Unit	250.000.000	1 Unit	262.500.000	1 Unit	275.625.000	1 Unit	289.406.250	1 Unit	303.876.563	5 Unit	1.381.407.813
			Bantuan Alat Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pemanfaatan sarana dalam peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan	4 paket	4 paket	390.677.962	4 paket	410.211.860	4 paket	430.722.453	4 paket	452.258.576	4 paket	474.871.505	4 paket	498.615.080	24 Paket	2.657.357.435
			Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen Kopi dan Karet	Jumlah Sapras Pasca Panen Kopi dan Karet	0	2 Paket	415.000.000	2 Paket	435.750.000	2 Paket	457.537.500	2 Paket	480.414.375	0	-	0	-	8 Paket	1.788.701.875
			Unit pengolahan hasil (UPH) Tembakau (DBH CHT)	Unit pengolahan hasil (UPH) Tembakau (DBH CHT)	0	1 Unit	112.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	130.000.000	0	-	0	-	0	-	3 Unit	362.000.000
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (BiO-CF)	Tersedianya prasarana Pasca Panen Kopi dan Karet (Pengadaan Barang/Jasa - BiOCF)	0	0	-	5 unit	415.000.000	5 unit	415.000.000	0	-	0	-	0	-		830.000.000
		03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	0	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	230.000.000	2 Dokumen	241.500.000	2 Dokumen	253.575.000	2 Dokumen	266.253.750	2 Dokumen	279.566.438	12 Dokumen	1.470.895.188
		04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tata Air Mikro	0	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	157.500.000	2 Dokumen	165.375.000	2 Dokumen	173.643.750	2 Dokumen	182.325.938	12 Dokumen	908.844.688
		07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah UPTD yang dilakukan pembangunan/pemeliharaan laboratorium	0	1 Unit	320.000.000	0	-	2 Unit	500.000.000	0	-	0	-	0	-	3 Unit	820.000.000
		08	Penyediaan Peralatan Laboratorium Pertanian	Tersedia Alat-alat Laboratorium	0	0	-	0	-	20 Jenis	1.500.000.000	0	-	0	-	0	-	20 Jenis	1.500.000.000

			09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Promosi dan Peluang Pasar serta Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.	4 Kegiatan	5 kegiatan	72.616.880	5 kegiatan	90.771.100	5 kegiatan	113.463.875	5 kegiatan	141.829.844	5 kegiatan	177.287.305	5 kegiatan	221.609.131	5 kegiatan	817.578.134
				Pengawasan Tata Niaga TBS dan Bokar	Jumlah Pengawasan	12 bulan	12 Kali	90.727.250	12 Kali	95.263.613	12 Kali	100.026.793	12 Kali	105.028.133	12 Kali	110.279.539	12 Kali	115.793.516	72 Kali	617.118.844
				Pengawasan dan Pembinaan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB)	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan	4 kab/kota	4 Kali	61.585.000	4 Kali	70.822.750	4 Kali	88.528.438	4 Kali	110.660.547	4 Kali	138.325.684	4 Kali	172.907.104	24 Kali	642.829.522
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Kasus Bencana Pertanian/Perkebunan	10	10	971.683.679	10	4.346.554.413	20	3.714.137.575	20	4.635.225.711	30	4.810.012.943	30	5.007.426.865	30	23.485.041.186
3	27	05	1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Cakupan Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	971.683.679	9 Kab/Kota	4.346.554.413	9 Kab/Kota	3.714.137.575	9 Kab/Kota	4.635.225.711	9 Kab/Kota	4.810.012.943	9 Kab/Kota	5.007.426.865		23.485.041.186
			01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Cakupan wilayah Pengendalian OPT	9 Laporan	9 Laporan	257.194.679	9 Laporan	270.054.413	9 Laporan	310.562.575	9 Laporan	357.146.961	9 Laporan	410.719.005	9 Laporan	472.326.856	54 Laporan	2.078.004.489
			02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Fasilitasi Pembangunan Demplot Model Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar (Bio CF).	0	0	-	0	-	0	-	2 Poktan	766.125.000	2 Poktan	766.125.000	2 Poktan	766.125.000	6 Poktan	2.298.375.000
				Pembentukan KTPA dan Prasarana /Sarana Pengendalian Kebakaran KTPA Baru (Bio CF-PSPP)	Terbentuknya KTPA dan Prasarana /Sarana Pengendalian Kebakaran (Bio CF).	0	0	-	1 Kelompok (KTPA)	770.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Kelompok (KTPA)	770.000.000
				Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat melalui Penerapan Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar	Terlaksananya Pembukaan Lahan Kebun Masyarakat	-	-	-	75 Ha	2.100.000.000	75 Ha	2.100.000.000	75 Ha	2.100.000.000	75 Ha	2.100.000.000	75 Ha	2.100.000.000	375 Ha	10.500.000.000

			03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Cakupan wilayah Pembinaan Pencegahan dan Penganggulangan Kebakaran, Bencana alam, Dampak Lingkungan	11 Kab/Kota	11 Laporan	514.489.000	11 Laporan	651.500.000	11 Laporan	684.075.000	11 Laporan	718.278.750	11 Laporan	754.192.688	11 Laporan	791.902.322	11 Laporan	4.114.437.759
				Fasilitasi Penyelesaian Kasus Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	Terselesainya Kasus GUP	4 Kasus	4 Kasus	200.000.000	4 Kasus	230.000.000	4 Kasus	264.500.000	4 Kasus	304.175.000	4 Kasus	349.801.250	4 Kasus	402.271.438	16 Kasus	1.750.747.688
				Pengawasan Kesiapan Sarana Prasarana Pemegang Izin Menghadapi Resiko Kebakaran Lahan	Terawasinya Kesiapan Sarana Prasarana Pemegang Izin Menghadapi Resiko Kebakaran Lahan	0	-	40 PT	200.000.000	40 PT	230.000.000	40 PT	264.500.000	40 PT	304.175.000	40 PT	349.801.250	200 PT	1.348.476.250	
3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelengkapan dokumen Perizinan Perkebunan Perusahaannya	60	100	50.000.000	100	350.000.000	100	262.500.000	100	275.625.000	100	289.406.250	100	403.876.563	100	1.631.407.813
3	27	06	1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaannya yang Memenuhi Standar Operasional/Ketentuan yang berlaku	6 PT	18 PT	50.000.000	18 PT	350.000.000	18 PT	262.500.000	18 PT	275.625.000	18 PT	289.406.250	18 PT	403.876.563	108 PT	1.631.407.813
			01	Penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	Dokumen Standar Pelayanan Publik	0	0	-	3 dokumen	100.000.000	0	-	0	-	0	-	3 dokumen	100.000.000	6 Dokumen	200.000.000
			02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen Penilaian Kelayakan dan Pertimbangan Teknis	3 Dokumen	0	-	15 Dokumen	150.000.000	15 Dokumen	157.500.000	15 Dokumen	165.375.000	15 Dokumen	173.643.750	15 Dokumen	182.325.938	75 Dokumen	828.844.688
			03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaannya yang dibina	14 PT	18 PT	50.000.000	18 Unit kebun dan 64 Penangkar	100.000.000	18 Unit kebun dan 64 Penangkar	105.000.000	18 Unit kebun dan 64 Penangkar	110.250.000	18 Unit kebun dan 64 Penangkar	115.762.500	18 Unit kebun dan 64 Penangkar	121.550.625		602.563.125

3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan SDM Petugas Penyuluh Perkebunan dan SDM Pekebun.	0	100	1.469.343.123,00	100	4.030.191.586,15	100	6.018.201.165,46	100	5.534.798.723,73	100	5.008.401.784,92	100	5.380.071.874,16	100	27.441.008.257,42	
3	27	07	1.01	Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	Jumlah tenaga Penyuluh Perkebunan Terampil	20 Orang	0	-	20 Orang	100.000.000	25 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	60 Orang	250.000.000	80 Orang	300.000.000	950.000.000	
			02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang berkualitas	0	0	-	20 Orang	100.000.000	30 orang	150.000.000	40 Orang	200.000.000	60 Orang	250.000.000	80 Orang	300.000.000	80 orang	1.000.000.000
3	27	07	1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Wilayah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan		4 kab/kota	977.199.123,00	4 kab/kota	2.601.427.886,15	4 kab/kota	3.569.499.280,46	4 kab/kota	3.364.224.244,48	4 kab/kota	3.069.935.456,70	4 kab/kota	3.369.682.229,54	4 kab/kota	16.951.968.220
			01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Bimbingan Teknologi Perbanyak dan Aplikasi Agen Hayati bagi Petani Provinsi Jambi	0	1 Poktan	136.200.083	4 Poktan	551.610.336,15	4 Poktan	579.190.853	4 Poktan	608.150.396	4 Poktan	638.557.915	4 Poktan	670.485.811	21 Poktan	3.184.195.394
			02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Kerjasama Usaha Perkebunan	20 orang	65 orang	391.274.040	295 orang	489.092.550	295 orang	513.547.178	295 orang	539.224.536	295 orang	566.185.763	295 orang	594.495.051	295 orang	3.093.819.118
				Pelaksanaan HKP dan PENAS	Terlaksananya HKP dan PENAS	0	2 Laporan	350.000.000	0	-	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	10 Laporan	1.150.000.000
				Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani	0	1 Poktan	46.725.000	10 Poktan	460.725.000	10 Poktan	483.761.250	10 Poktan	507.949.313	10 Poktan	533.346.778	10 Poktan	560.014.117	51 Poktan	2.592.521.458
				Pelatihan GAP bagi Petani Swadaya	Jumlah Petani Milenial / Swadaya	0	20 orang	53.000.000	0	-	200 orang	318.000.000	200 orang	333.900.000	200 orang	350.595.000	200 orang	368.124.750	800 orang	1.423.619.750
				Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Perkebunan	Terbentuknya Kemitraan Usaha Perkebunan	0	0	-	5 Kelompok	400.000.000	7 Kelompok	500.000.000	10 Kelompok	625.000.000	15 Kelompok	781.250.000	20 Kelompok	976.562.500	57 Kelompok	3.282.812.500
				Bimbingan Teknis Pasca Panen	Terlaksananya Bimtek Pasca Panen (Bio-CF)	0	0	-	100 orang	150.000.000,00	200 orang	425.000.000	0	-	0	-	0	-	300 orang	575.000.000
				Rintisan Sertifikasi ISPO Swadaya (BIO-CF)	Jumlah Sertifikat ISPO Swadaya (BIO-CF)	0	0	-	3 Sertifikat ISPO	550.000.000	3 Sertifikat ISPO	550.000.000	3 Sertifikat ISPO	550.000.000	0	-	0	-	9 Sertifikat	1.650.000.000

3	27	07	1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Mapan.		3 Poktan	492.144.000	6 Poktan	1.702.563.700	8 Poktan	2.691.191.885	8 Poktan	2.432.688.979	8 Poktan	2.121.186.553	8 Poktan	2.164.745.881	41 Poktan	11.604.520.998
			01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Kelembagaan Petani yang bermitra.	0	3 Poktan	27.394.000	6 Poktan	28.763.700	8 Poktan	30.201.885	8 Poktan	31.711.979	8 Poktan	33.297.578	8 Poktan	34.962.457	41 Poktan	186.331.600
					Dukungan Teknis Penanganan Pasca Panen Rakyat	0	3 Poktan	75.000.000	3 Poktan	225.000.000	3 Poktan	236.250.000	0	-	0	-	0	-	6 Poktan	536.250.000
					Bimtek Pasca Panen Kopi dan Karet	0	7 Kelompok	50.000.000	7 Kelompok	350.000.000	7 Kelompok	367.500.000	7 Kelompok	385.875.000	7 Kelompok	405.168.750	7 Kelompok	425.427.188	42 Poktan	1.983.970.938
					Rintisan Model Pengembangan Desa Mandiri Benih	0	1 Desa	264.750.000	0	-	1 Desa	264.750.000	1 Desa	277.987.500	0	-	0	-	3 Desa	807.487.500
					Pertemuan Kerjasama Perdagangan (Petani dengan Crumb Rubber, Coffe, Supply chain alternatif) Bio CF	0	Buffer 4 TN dan 4 KPH	75.000.000	Buffer 4 TN dan 4 KPH	75.000.000	Buffer 4 TN dan 4 KPH	150.000.000	Buffer 4 TN dan 4 KPH	75.000.000	0	-	0	-	Buffer 4 TN dan 4 KPH	375.000.000
				Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Peningkatan Kapasitas untuk meningkatkan Produktivitas areal tanaman rakyat (Bio-CF)	0	0	-	2 Kab/ komoditi Karet dan Kopi	373.800.000	2 Kab/ komoditi Karet dan Kopi	392.490.000	2 Kab/ komoditi Karet dan Kopi	412.114.500	2 Kab/ komoditi Karet dan Kopi	432.720.225	2 Kab/ komoditi Karet dan Kopi	454.356.236	10 Kab/ komoditi Karet dan Kopi	2.065.480.961
					Terbentuknya Poktan Rintisan Sertifikasi ISPO Swadaya	0	0	-	2 Poktan	300.000.000	6 Poktan	900.000.000	26 Poktan	3.900.000.000						
					Identifikasi dan Penguatan Hulu-Hilir Kelembagaan Petani Perkebunan	0	0	-	11 Laporan	350.000.000	11 Laporan	1.750.000.000								
TOTAL PAGU								27.603.114.904		53.283.233.215		59.661.265.446		58.939.844.471		61.063.528.595		64.010.140.889		324.561.127.521

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Rencana Kinerja Penyelenggaraan Bidang

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD pada Tabel 17, berikut :

Tabel 17. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan

Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai SAKIP	60,08 (B)	65,00 (B)	67,00 (B)	69,00 (B)	71,00 (B)	73,00 (BB)	73,00 (BB)
Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	4,22	4,22	4,82	5,04	5,28	5,49	5,49
Persentase Pengendalian OPT	0,27	0,27	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33
Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11
Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
Persentase Perizinan yang diselesaikan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Persentase SDM dan Kelembagaan	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
Nilai Tukar Petani Sub sektor Perkebunan	117,83	122,69	127,76	133,04	138,53	144,25	144,25

Comment [i-[4]]: Diseuaikan dengan Table 15

Comment [i-[5]]: Organisme Pengganggu Tanaman

Comment [i-[6]]: Di Koordinasikan Lagi ke Dinas Pertanian tentang 1 Desa 1 Penyuluh

Comment [i-[7]]: Di uBah Menjadi 127

BAB VIII PENUTUP

Pengembangan komoditas perkebunan di Provinsi Jambi belum optimal. Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain permasalahan dari aspek teknis berupa: (1) luas tanam dan luas panen tanaman perkebunan yang semakin menurun akibat bertambahnya tanaman tua dan rusak; (2) rendahnya produktivitas tanaman perkebunan; (3) kondisi sarana dan prasarana belum memadai; (4) penerapan teknologi perkebunan masih rendah; (5) Belum tertibnya permasalahan perizinan usaha perkebunan; (6) industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas; dan (7) masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan keterampilan petani. Permasalahan lainnya juga ditemukan antara lain keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber permodalan dan kapasitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan perkebunan masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi besar dalam memberikan kontribusi PDRB Provinsi Jambi.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan perencanaan pembangunan sub sektor perkebunan yang terarah, terpadu, dan bersinergi antar sub sektor/sektor terkait, dengan tetap mempedomani dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa mendatang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu mendatang. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 serta isu-isu bidang tanaman Perkebunan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk jangka waktu 2021-2026. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Perkebunan ini dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk tahun 2021 - 2026, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.